

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERAN NEGARA DALAM MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN**

(Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RIZKI AMELIA

NPM : 1521020063

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN NEGARA DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**(Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Dimana dalam teorinya Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH diatur dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun, sebagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku bahwa bantuan sosial PKH yang disalurkan di Kelurahan Kali Balau Kencana tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran negara dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Peran Negara terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung?

Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana peran negara dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1. Peran negara dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah direalisasikan di Kelurahan Kali Balau Kencana hanya saja belum optimal sebagaimana kendala yang masih terjadi antara lain: a. Bantuan yang belum tepat sasaran, b. Keterlambatan dalam mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan, c. Saldo nol di dalam ATM. 2. Hukum Islam mengenai bantuan sosial PKH bahwa bantuan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yakni tujuan keduanya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S An-Nahl (16) : 67. Direkomendasikan kepada 1. Dinas Sosial seharusnya terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang seharusnya layak untuk dibantu dan mendapatkan bantuan sosial PKH. 2. Kepada masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan PKH maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang sudah diatur oleh pemerintah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amelia
NPM : 1521020063
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Juli 2019

Penulis,



Rizki Amelia
1521020063



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

Nama : Rizki Amelia
NPM : 1521020063
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP. 196210221993031002

NIP. 197411062000031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)**. Disusun oleh Rizki Amelia NPM 1521020063 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jumat, 16 Agustus 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM 106210221993031002

MOTTO

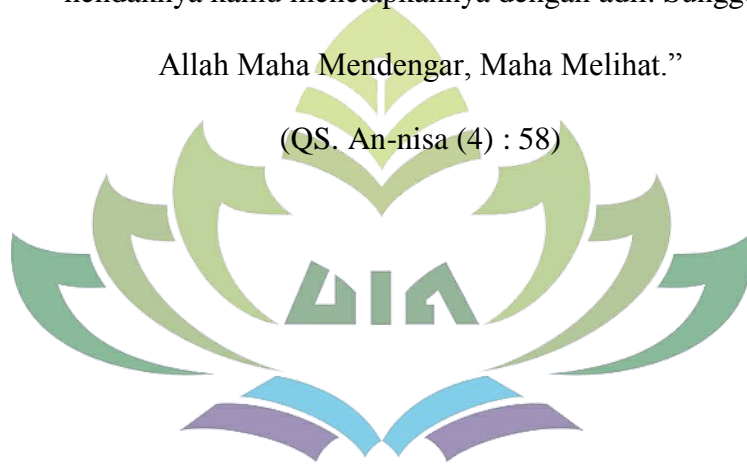
نَبِّالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ يَا مُرْكُمَ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرَ أَسْمِعَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمَ اللَّهُ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku Muhammad Maliki (Alm), walau kini ayah sudah di surga sana semoga ayah bisa bangga melihat putrimu kini sudah menyelesaikan skripsinya dan mendapatkan gelar sarjana.
2. Abi dan ibuku tersayang Margianto dan Asmariah, yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putrinya.
3. Ketiga adiku tercinta, Ririn Amelia, Lahita Citra Sari, Musa Candra Wiguna yang selalu menjadi penyemangat kakaknya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Mei 1997 dengan selamat dan diberi nama Rizki Amelia, merupakan putri dari buah cinta kasih pasangan Muhammad Maliki (Alm) dan Asmariah, penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanan (TK) Padjajaran Bandar Lampung, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kali Balau Kencana Bandar Lampung pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikannya di MTsN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Perintis 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Siyash Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur masuk SPAN-PTKIN.

Selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juli 2019
Yang Membuat,

Rizki Amelia
1521020063

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

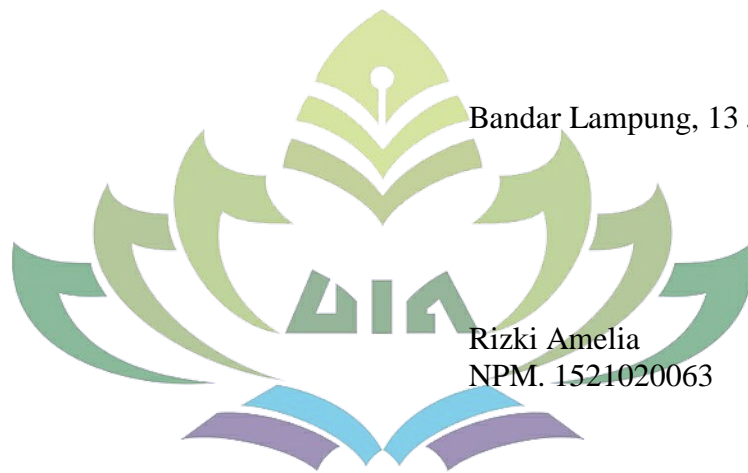
Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga skripsi ini selesai..
3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala dan staf Dinas Sosial, Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung, Kelurahan Kali Balau Kencana di Kota Bandar Lampung terimakasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
8. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi Kak Ahmad Arya Dimantara, S.Hi, Inayah, Karisma, Anggraini, Ria Dwi, Fitri, Ipeh, Mayang, Matang, Annisa, Repi, Ice, Gosa, Ovi, Andre, Jodi, Ary, Billi, Satria, Gilang, Fajar, Fauzi terimakasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
9. Sahabat terbaikku Rizka, Ayu, Ayun, Devita, Vivi, Dwi, Anti, Didit, Bang Eka, Cahyanti Anggraini, Itiw, Novi, Inas terimakasih selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
10. Keluarga besar UKM-f Gemais Febriana, Meri, Luthfiah, Maysaroh, mba Niken, Umi, Popi, Izzah, Nur Tiaradan lainnya yang selalu memberikan motivasi semangat dan dorongan agar aku cepat menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan Siyasah Eterimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 13 Juli 2019

Rizki Amelia
NPM. 1521020063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kesejahteraan	19
B. Islam dan Masalah Kesejahteraan	20
C. Perintah Mensejahterakan Masyarakat	27
D. Upaya Mensejahterakan Masyarakat Miskin Pada Masa Rasulullah SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin	33
E. Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat	45
F. Prinsip Kesejahteraan	48
G. Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
B. Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan	69
C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kali Balau Kencana dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu	84
D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kali Balau Kencana	93

BAB IV ANALISIS

- A. Peran Negara dalam Merealisasikan
Program Keluarga Harapan untuk Mensejahterakan
Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Kali Balau
Kencana Kota Bandar Lampung.....96
- B. Pandangan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan
dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu
di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung.....99

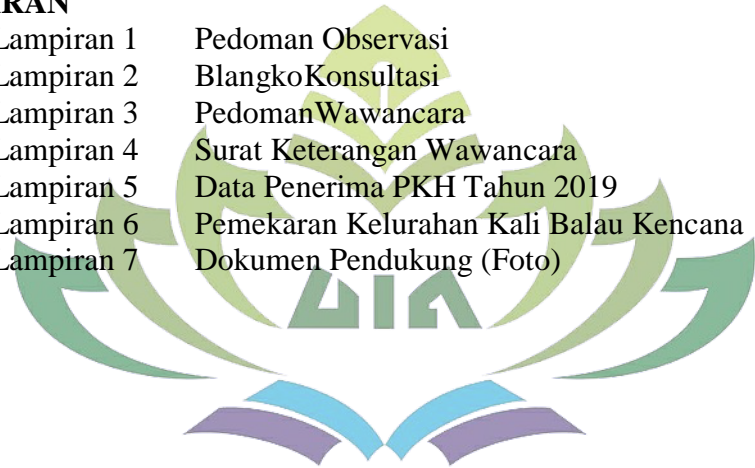
BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....104
- B. Rekomendasi105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Blangko Konsultasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Data Penerima PKH Tahun 2019
- Lampiran 6 Pemekaran Kelurahan Kali Balau Kencana
- Lampiran 7 Dokumen Pendukung (Foto)



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data Nama Lurah Kelurahan Kali Balau Kencana	61
2. Jumlah Penduduk Menurut Umur Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2019	65
3. Jumlah KK Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	66
4. Jumlah Mata Pencarian Berdasarkan KK di Kelurahan Kali Balau Kencana	67
5. Jumlah Penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Agama	67
6. Jumlah Penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Etnis	68
7. Data Keluarga Miskin	69
8. Komponen dan Kategori Program Keluarga Harapan	85
9. Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2016	86
10. Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2017	87
11. Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2018	88
12. Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2019	89



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung62
2. Struktur Perangkat Kelurahan Kali Balau Kencana
Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung63



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan guna mempermudah dan untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul : **Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).**

Penjelasan dari istilah pokok judul skripsi ini adalah:

1. Analisis Hukum Islam.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹
- b. Hukum Islam adalah titah Allah swt yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut. al-Quran dan Sunnah, secara jelas (eksplisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam.²

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 32.

² Abuddin Nata, (ed.), *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5.

Jadi yang dimaksud analisis Hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya titah Allah swt yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan.

2. Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu.

- a. Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan.³
- b. Negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan.⁴
- c. Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu adalah dalam konteks kesejahteraan, cetera adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁵

Jadi yang dimaksud Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu adalah ikut serta dalam suatu wilayah untuk mensejahterakan masyarakatnya dari segi kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran.

3. Program Keluarga Harapan

- a. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin,

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed Empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1052.

⁴ Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni Surabaya, 2005), h. 433.

⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶

Jadi yang dimaksud Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan.

4. Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung

- a. Studi adalah adalah kajian, telaah, penelitian, dan penyelidikan ilmiah.⁷
- b. Kelurahan Kali Balau Kencana adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.⁸
- c. Kecamatan Kedamaian adalah kelurahan yang berada di kecamatan kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.⁹
- d. Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.¹⁰

Jadi yang dimaksud Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung adalah untuk mengumpulkan data dan

⁶Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018, h. 6.

⁷Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: PT. Modern English pers, Balai Pustaka, 1989), h.861

⁸https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalibalau_Kencana_Kedamaian_Bandar_Lampung(online 21 Agustus 2019, 17.44)

⁹<https://buc.kim/d/6fV8r2X2BKlr?pub=link> (online 21 Agustus 2019, 17.48)

¹⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (online 21 Agustus 2019, 17.54)

informasi yang dilakukan di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah diatas dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran negara dan tinjauan hukum Islam terhadap bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah

1. Alasan Objektif

Adapun alasan objektif di bawah ini adalah:

- a. Data yang dikumpulkan dari Tahun 2016 sampai 2019 jumlah warga yang mendapat bantuan sosial PKH hanya meningkat sedikit.
- b. Penulis memilih Kelurahan Kali Balau Kencana untuk diteliti karna bantuan sosial PKH yang disalurkan di daerah tersebut masih terdapat masalah didalamnya yaitu masih banyak masyarakat yang belum sejahtera belum tersentuh oleh bantuan PKH tersebut sehingga dikatakan belum merata dan bantuan yang masih belum tepat sasaran.

2. Alasan Subjektif

Adapun alasan subjektif di bawah ini adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu

melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)

- b. Tersedianya literature yang menunjang untuk menyelesaikan skripsi ini
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyah

C. Latar Belakang Masalah

Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Dimana dalam teorinya Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH diatur dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun, sebagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku bahwa bantuan sosial PKH yang disalurkan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana masih dikatakan belum optimal dimana masyarakat banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu dibantu untuk kebutuhan perekonomiannya. Dalam

penyaluran bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dimana dalam penyaluran bantuan sosial tersebut tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata.

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan rakyatnya.¹¹ Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹³ Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

¹¹*Ibid*, h. 62.

¹²*Ibid*, h. 65.

¹³ Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya: untuk Pelajar dan Umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018) h. 88.

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni untuk mensejahterakan rakyatnya salah satu nya dengan menjalankan program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya yakni diatur pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. Perlindungan sosial,
2. Jaminan sosial,
3. Pemberdayaan sosial,
4. Rehabilitasi sosial, dan
5. Pelayanan dasar.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI ,..., h. 3.

Tujuan Hukum Islam, bahwa dalam hidup ini manusia memerlukan agama, ia wajib mempertahankan eksistensinya (jiwa), melindungi akal, keturunan, dan hartanya. Kebutuhan primer itu disebut *al-daruriyat*, kebutuhan sekunder dinamakan *al-hajiyat* dan kebutuhan tersier *al-tahsiniyat*.

Tujuan pembangunan nasional dapat dirumuskan dengan satu kalimat “meningkatkan kualitas bangsa Indonesia baik secara spiritual maupun material”. Tujuan pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dilihat dari sudut doktrin Islam (QS. Al-Baqarah (2) : 201)

النَّارِ عَذَابٌ وَقَدْ حَسَنَ الْآخِرَةُ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِئَاتِنَارٌ بَنَّا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

*Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”*¹⁸

Maka tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.¹⁹

Upaya Hukum Islam yang perlu di lakukan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu berkaitan dengan lembaga sosial Islam (LSI) yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.²⁰

Alokasi dana zakat harus di prioritaskan bagi mereka yang memerlukannya (fakir miskin dan mereka yang berpendapatan rendah).²¹

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang diatas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan , oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “Analisis Hukum Islam terhadap Peran

¹⁸ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H), h. 49

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, h. 302.

²⁰ *Ibid*, h. 303.

²¹ *Ibid*.

Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)''.

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran negara dalam merealisasikan program keluarga harapan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di kelurahan kali balau kencana kecamatan kedamaian kota bandar lampung?
2. Bagaimanapandangan hukum Islam terhadap peran negara mengenai program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di kelurahan kali balau kencana kecamatan kedamaian kota bandar lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Negara dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Program Keluarga Harapan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bentuk untuk berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²²Dibawah ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan

²²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.19.

atau pada responden.²³ Disini penulis akan terjun ke lapangan dimana penulis akan meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan.²⁴ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh dari responden. Sumber datatersebut terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data

²³ *Ibid*, h. 9.

²⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

asli atau data baru²⁵ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut data tersedia.²⁶ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, dengan mengumpulkan data dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Selanjutnya, data-data itu dianalisis dan disimpulkan secara induktif. Dan akhirnya dapatlah kita memutuskan bahwa hipotesis ditolak atau diterima.

a. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

²⁶ *Ibid*, h. 82.

yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula²⁷ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yakni alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

c. Metode Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen

²⁷Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 179.

²⁸Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 70.

rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁹ yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁰ Populasi disini adalah seluruh warga Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang mendapat bantuan sosial PKH, aparatur pemerintah dan kelurahan yang menyangkut penerimaan bantuan sosial PKH.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.³¹ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³² *Purposive*

²⁹M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian*, h. 87.

³⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), h.

33

³¹Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 81.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 191), h. 102.

sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Sekretaris Kelurahan (1 orang) yang menyimpan data dan mengetahui perkembangan Kelurahan Kali Balau Kencana, Kasi Fakir Miskin dan Banjamsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (1 orang) berperan mengawasi perkembangan PKH di Kota Bandar Lampung, Koordinator Operator PKH Kota Bandar Lampung (1 orang) orang yang menyimpan semua data PKH di Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung, pendamping PKH Kota Bandar Lampung (2 orang) yang mendampingi masyarakat penerima PKH di lapangan, masyarakat penerima bantuan sosial PKH (20 orang) yang sudah lama mendapat bantuan PKH, masyarakat Kelurahan Kali Balau Kencana (6 orang) yang belum menerima bantuan sosial PKH.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang didapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³³

³³M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian*, h. 122.

b. Penandaan Data (*Koding*)

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya di klasifikasikan dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.³⁴

c. Penyusunan atau Sistematis Data (*constructing dan systematizing*)

Penyusunan atau Sistematis Data adalah pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³⁵

6. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁶

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *Deskriptif* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dalam arti (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi. Pelaku atau

³⁴*Ibid*, h. 123.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9.

³⁶*Ibid*, h. 128.

responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya.³⁷

Analisis kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, diredaksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).³⁸

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

³⁷ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 129.

³⁸ *Ibid*, h. 130.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial (social welfare) seringkali diartikan sebagai :
“Institusi dan pelayanan yang mempunyai tujuan utama untuk memelihara dan mengembangkan atau meningkatkan kualitas fisik, kualitas sosial, intelektual maupun emosional masyarakat.³⁹ Arti istilah tersebut terus berkembang selaras dengan perkembangan waktu, dan meluas kepada lembaga-lembaga atau kegiatan seperti social security, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, sampai akhirnya masalah pendidikan masuk lingkup kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas lokal, sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan international agencies.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan adalah suatu hal atau keadaan sejahtera, adanya keamanan, keselamatan, dan ketentraman.⁴¹

Sedangkan dalam konteks kesejahteraan, cetera adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁴²

³⁹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 159.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.

⁴²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 8.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.⁴³

Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 201 :⁴⁴

النَّارِ عَذَابٌ وَقِنَا حَسَنَةً إِلَّا خَيْرٌ وَفِي حَسَنَةٍ الدُّنْيَا فِيءَاتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

*Dan diantara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.”*⁴⁵

Ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.⁴⁶

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur’an dirumuskan dengan kata-kata “*baladun thayibatun wa rabbun ghafuur*” yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban smengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.⁴⁷

B. Islam dan Masalah Kesejahteraan

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti, yang selalu digambarkan sebagai :

- a. Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi

⁴³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, h. 302.

⁴⁵Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 49

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, h. 456.

- b. Kecukupan sandang yang bagus-bagus
- c. Tempat tinggal yang indah dan nyaman
- d. Lingkungan hidup yang sehat dan segar
- e. Hubungan sosial yang tentram dan
- f. Dikelilingi pelayan-pelayanan yang trampil dan mengairahkan
- g. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah, Tuhan Maha Pemurah⁴⁸

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera yang ideal itu, ditegaskan bahwasanya harus melalui proses yang panjang, yakni :

Pertama: keimanan yang mantap kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan rukun iman lainnya

Kedua: ketekunan melakukan amal-amal saleh, baik amalan yang bersifat ritual, seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain dan amalan yang bersifat sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas lagi seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya.

Ketiga: kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan (*al-muhlikat*).⁴⁹

Gambaran kesejahteraan kehidupan surgawi itu tadi yang diidentifikasi sebagai kebahagiaan akhirat (*fil akhirati hasanah*). Tapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut, Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi (*fiddunya*

⁴⁸Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial*, h. 161.

⁴⁹*Ibid*, h. 162.

hasanah), dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi.

Jika orang memperhatikan ajaran-ajaran Islam dengan cermat, akan mendapatkannya selalu mengacu kepada perwujudan kemaslahatan manusia dan pencapaian-pencapaian kebutuhan dasarnya maupun kesejahteraannya, baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi.

As-Syathiby mengatakan, bahwa penetapan hukum-hukum syara' selalu berorientasi kepada kepentingan hidup manusia. Kepentingan atau kebutuhan hidup manusia itu dibagi menjadi tiga kategori :

Prioritas pertama *ad-Dhoruriyat* ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan minimum.

Proritas kedua *al-Hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.

Prioritas ketiga *at-Tahsinat* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dari pada kebutuhan hidup.⁵⁰

Imam Al-Ghozali seperti halnya juga as-Syathiby, berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-Dhoururiyat* yang menjadi prioritas garapan Islam adalah yang menjalin kemaslahatan :

- a. *Ad-Dienu* (agama)
- b. *An-Nafsu* (jiwa)
- c. *An-Naslu* (keturunan)

⁵⁰*Ibid*, h. 164.

d. *Al-Malu* (harta benda)

e. *Al-Aqlu* (akal atau fikiran)⁵¹

Dalam hubungan konsep tersebut diatas, dapat difahami lebih lanjut, mengapa Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, dan mabuk-mabukan. Demikian pula Islam memerintahkan usaha-usaha yang dapat menanggulangi kemiskinan, melalui kerja keras, pemerataan kemakmuran dengan cara menunaikan zakat, waqaf, sodaqah, hibah, waris, wasiat dan lain sebagainya, agar tidak terjadi akumulasi kekayaan hanya kepada beberapa orang kaya saja. Masalah kesehatan, diperhatikan mulai dari makanan yang bergizi, kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan, sampai pengobatan dan olahraga.⁵²

Dalam hal pencerdasan masyarakat, Islam memandang usaha pencerdasan itu sebagai kewajiban, dalam waktu seumur hidup. Membaca dan menulis menjadi perintah scriptural, disamping itu Islam memandang penyebaran ilmu sebagai *amal jariyah*. Kecerdasan (*al-fathonah*) dalam teologi islam dipandang sebagai sifat wajib bagi para Rasul dan keilmuan dipandang sebagai salah satu indikator kualitas umat.⁵³ Seperti yang tercantum sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mujaadilah ayat 11:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, h. 165

⁵³ *Ibid.*

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَفْسَحَ لِّىَّ الْمَجْلِسَ اِذَا اَمْنُوْا الَّذِيْنَ يَنْتَهِىْ
وَاللّٰهُ دَرَجَتٌ اَلْعِلْمُ اَوْ تُوَاوِىَّ الَّذِيْنَ مِنْكُمْ اَمْنُوْا الَّذِيْنَ اَللّٰهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوْا اَنْشُرُوْا قِيْلَ وَاِذْ
خَيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا

*"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁵⁴

Menolong fakir miskin dan menyantuni anak yatim menjadi ukuran pembuktian kualitas agama seseorang, dan mengusahakan kebutuhan hidup masyarakat dinilai sebagai ibadah amal jariyah.⁵⁵

Ada beberapa masalah sosial yang oleh Islam di pandang sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan. Diantara yang menonjol adalah :

a. Kebodohan (*al-Jahalah*)

Jika al-Qur'an menyatakan, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, melebihi lainnya, berarti kebodohanlah yang menjadi salah satu penyebab kemerosotan dan keterbelakangan martabat manusia. Oleh karena itu Islam memandang penanggulangan kebodohan itu sebagai ibadah, sebaliknya membiarkan kebodohan dipandang sebagai tindak kemungkaran. Ada sebuah hadis yang menegaskan masalah ini,

⁵⁴ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 910-911.

⁵⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, h.166.

yakni tentang komunitas muslim yang disebut *asy 'ariyin*, suatu kelompok terpelajar yang membiarkan lingkungannya tetap dalam kebodohan.

b. Kemiskinan (*al-Fakru / al-Maskanah*)

Wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya (*adequacy*) dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya (*scarcity*). Hal ini bermula dari premis, bahwa sumber daya alam itu berkecukupan untuk memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu jika kelangkaan itu muncul, maka akibat kesalahan orang dalam memanfaatkannya, melestarikannya atau karena kebodohan dan kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai patologi sosial yang harus ditanggulangi.

c. Kemaksiatan (*al-Maksiyah*)

Kekacauan jiwa, kegoncangan hati, ketidak-tentraman batin, sentiment, dendam dan macam-macam penyakit batin lainnya adalah dampak langsung dari kemaksiatan. Berapa banyak kehancuran sosial akibat dari tindak maksiat, seperti pembunuhan, perjudian, atau lain-lainnya lagi, malah juga kehancuran rumah tangga, lingkungan dan martabat seseorang sebagai individu. Dalam menceritakan Bani Israil, al-Qur'an menghubungkan antara kemerosotan dan kenistaan hidup dengan perbuatan maksiat dan pelanggaran. Firman Allah swt dalam surat alBaqarah (2) : 61 :

ضُتْنِتُمْ مَالَنَا نَخْرِجَ رَبَّكَ لَنَا فَادْعُوا حِدِ طَعَامٍ عَلَى نَصِيرٍ لَنْ يَمُوسَى قُلْتُمْ وَإِذَا
 هُوَ الَّذِي أُنْتَبِذْتُمْ لَوْ قَالَ وَبَصَلَهَا وَعَدَسَهَا وَفُومَهَا وَقَثَائِبَهَا بِقَلْبِهَا مِنْ الْأَرْضِ
 لَذَلَّةٌ عَلَيْهِمْ وَضُرِبَتْ سَأَلْتُمْ مَا لَكُمْ فَإِنَّ مِصْرًا أَهْبَطُوا أَحْيَرُ هُوَ الَّذِي أَدْنَى
 اللَّهُ بَيَاتٍ يَكْفُرُونَ كَانُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ بَغْضٍ وَبَاءٌ وَوَالْمَسْكَنَةُ
 يَعْتَدُونَ وَكَانُوا عَصَوًا بِمَا ذَلِكَ الْحَقِّ بَغَيْرِ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.⁵⁶

Banyak anjuran-anjuran al-Qur'an maupun Sunnah dan fatwa-fatwa Ulama agar ketiga penyakit sosial tersebut ditanggulangi, agar dapat mewujudkan kesejahteraan yang sebenarnya :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰی وَالتَّقٰی وَالعِفَافَ وَالْغِنٰی.

"Wahai Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, tahan diri dan kecukupan hidup". (HR. Muslim dan Turmudzi).⁵⁷

⁵⁶ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, h. 19.

⁵⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, h. 170-172.

C. Perintah Mensejahterakan Masyarakat

Al-Qur'an mengandung konsep kesejahteraan sosial, dibawah ini merupakan dasar hukum dari kesejahteraan sosial

- a. Surat An-Nisa ayat 9 Tentang Anjuran Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Sosial

وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ فَلَيْتَقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضَعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا الْوَالِدِينَ وَيَخْشَ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَّةً

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁵⁸

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.⁵⁹

⁵⁸Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), h. 128.

b. Surat Quraishy Ayat 3-4 Tentang Indikator-indikator Kesejahteraan Sosial

خَوْفٍ مِّنْ وَّاءٍ أَمْنَهُمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي الْبَيْتِ هَذَا رَبِّ فَلْيَعْبُدُوا

*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*⁶⁰

Pada ayat diatas pemberian pangan yang dimaksud adalah ketersediaan lahan dan sumber daya alam sehingga dengan anugerah itu mereka tidak kelaparan. Pemberian pangan itu bukan saja melalui keuntungan yang mereka raih dari perjalanan dagang, tetapi juga melalui fasilitas darat dan laut serta udara.⁶¹

Dua hal yang disebut pada ayat terakhir surat ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan (stabilitas) keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keduanya saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan, dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan, dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah Pemberi rasa aman serta Pencurah aneka rezeki.⁶²

⁶⁰ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1106

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 539.

⁶² *Ibid.*

c. Surat An-Nahl ayat 97 Tentang Kesejahteraan Sosial

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبَ حَيَوةً فَلَنَحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ تَنَزَّلُ أَذْكَرٌ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَن
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَابِ احْسَنِ أَجْرَهُمْ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*⁶³

Dalam ayat ini merupakan janji Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan amal saleh, yaitu amal yang sejalan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, sedang kalbunya merasa tenteram dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Janji itu adalah bahwa Allah akan memberinya kehidupan yang lebih baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik mencakup seluruh jenis nikmat yang menggembirakan hati, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁴

Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (رواه أحمد)

⁶³ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 417.

⁶⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 1063.

Sungguh beruntunglah orang yang berserah diri, yang diberi rezeki dengan rasa cukup, dan yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah baginya. (HR Ahmad)⁶⁵

- d. Surat At-Thalaq ayat 3 Tentang Peran Allah SWT dalam Memberikan Kesejahteraan Bagi hamba-Nya

قَدْ أَمَرَهُ بَلِّغِ اللَّهَ إِنِّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهُ عَلَى يَتَوَكَّلْ وَمَنْ تَحْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ
 قَدْ رَأَى شَيْءٍ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.⁶⁶

Dalam ayat ini bahwa siapa yang secara mantap dan bersinambung beriman kepada Allah dan hari akhirat dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan tuntunan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari aneka kesulitan hidup termasuk hidup rumah tangga yang dihadapinya. Dan memberinya rezeki yakni sebab-sebab perolehan rezeki duniawi dan ukhrawi dari arah yang tidak yang tidak diduga sebelumnya. Karena itu jangan khawatir akan menderita atau sengsara karena menaati perintah Allah, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah setelah upaya maksimal niscaya Dia yakni Allah mencukupi keperluan-Nya antara lain ketenangan hidup di dunia dan akhirat.⁶⁷ Sesungguhnya Allah akan mencapai urusan yang dikehendaki-Nya sehingga semua tidak akan

⁶⁵Ibid, h. 1064.

⁶⁶Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h.946.

⁶⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 14*, h. 295.

meleset. Karena Dia-lah Penyebab dari segala sebab, jika Dia berkehendak Dia hanya berkata: “jadilah” maka jadilah yang dikehendaki-Nya itu. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan kadar ukuran dan waktu untuk masing-masing, sehingga tidak ada yang terlampaui.⁶⁸

e. Surat At-Takatsur ayat 1-2 Tentang Larangan Bermegah-Megahan

﴿الْمَقَابِرُ زُرْتُمْ حَتَّىٰ التَّكَاثُرُ أَهْنَكُمُ﴾

*Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur.*⁶⁹

Maksudnya bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya Telah melalaikan kamu dari ketaatan.⁷⁰

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan banyak harta, teman dan pengikut, sehingga melalaikannya dari kegiatan beramal. Mereka asyik dengan berbicara saja, terpedaya oleh keturunan mereka dan teman sejawat tanpa memikirkan amal perbuatan yang bermanfaat untuk mereka dan keluarga mereka.⁷¹

Allah menjelaskan keadaan bermegah-megahan diantara manusia atau dengan usaha untuk memiliki lebih banyak dari orang lain akan terus berjalan diantara mereka sehingga mereka masuk lubang kubur. Dengan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h.1096.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsir*, h. 792

⁷¹*Ibid.*

demikian mereka telah menyia-nyiakan umur mereka untuk yang tidak berfaedah, baik dalam hidup dunia maupun untuk kehidupan akhirat.⁷²

Demikian pula perintah untuk mensejahterakan masyarakat diatur dengan jelas dalam ketentuan per Undang-undangan seperti dapat diketahui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana perintah mensejahterakan masyarakat terdapat pada alinea keempat yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷³

Secara lebih operasional disebutkan pula pada batang tubuh Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷⁴

Dengan payung hukum pembukaan Undang-Undang alinea keempat dan Pasal 34 ayat 1 maka turunlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan

⁷²*Ibid*, h. 793.

⁷³ Tim Grasindo, *UUD 1945*, h. 33

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.⁷⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.⁷⁶

D. Upaya Mensejahterakan Masyarakat Miskin pada Masa Rasulullah SAW dan Khulaufaur Rasyidin

1. Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi.⁷⁷ Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika Muhammad dalam kandungan ibunya. Setelah lahir, Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, Halimah Sa'diyyah. Dalam asuhannyalah Muhammad dibesarkan sampai usia empat tahun. Setelah itu, kurang lebih dua tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia enam tahun, dia menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Muhammad, orang yang

⁷⁵Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, h. 3.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷ Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2016), h. 26.

dipersiapkan untuk membawa risalah-Nya yang terakhir. Allah SWT berfirman dalam surat Adh-Dhuha ayat 6-7 :

﴿فَهْدَىٰ ضَلَالًا وَّوَجَدَكَ﴾ ﴿فَقَاوَىٰ يَتِيمًا جَدَّكَ أَلَمْ﴾

*Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberimu petunjuk.” (QS Adh Dhuha 95: 6-7).*⁷⁸

Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad. Namun, dua tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Seperti juga Abdul Thalib, dia sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan, tetapi dia miskin.⁷⁹

Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah saw. yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas beradab.⁸⁰ Sejak Muhammad saw dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.⁸¹

⁷⁸ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h.1070.

⁷⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 16-17.

⁸⁰ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 63.

⁸¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 27.

Peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antaranya sebagai berikut.⁸²

1) Pembangunan Masjid Nabawi

Selain untuk tempat sholat, masjid sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, disamping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi.⁸³

2) Persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Anshar

Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka.⁸⁴

3) Kesepakatan untuk Saling Membantu antara Kaum Muslimin dan Non-Muslimin

Di Madinah, ada tiga golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslim, dan orang-orang Yahudi (Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa'). Rasulullah satu kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian. Juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut.⁸⁵

⁸² Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 63.

⁸³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 26.

⁸⁴ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 63.

⁸⁵ *Ibid*, h. 64.

4) Peletakan Asas-asas Politik, Ekonomi, dan Sosial

Proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yastrib adalah: pertama, mengubah nama Yatrib menjadi Madinah (*Madinat Ar-Rasul, Madinah An-Nabi, atau Madinah Al-Munawwarah*). Kedua, membangun masjid. Ketiga, membentuk kegiatan *mu'akhat* (persaudaraan). Keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, dan kelima, Nabi Muhammad SAW. membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh.⁸⁶

Sumber-sumber pendapatan negara pada masa Nabi Muhammad saw, antara lain terdiri dari, *zakat, infak, sedekah, ghanimah* dan *jizyah*. Zakat, infak, sedekah merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari kaum muslimin. *Ghanimah* adalah harta rampasan perang yang ditentukan dalam Al-quran 4/5 bagian untuk tentara Madinah yang turut dalam suatu pertempuran atau perang dan 1/5 bagian lainnya untuk Rasulullah. Jumlah 1/5 itu tidak bersifat mutlak untuk beliau pribadi, namun digunakan juga untuk kepentingan umatnya.⁸⁷

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Selain pengaturan masalah orang yang berkewajiban zakat, juga siapa yang berhak menerimanya. Pengaturan

⁸⁶ *Ibid*, 64-65.

⁸⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 168.

untuk zakat diuraikan secara jelas dan eksplisit dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 :

أَبْوَفِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
كَيْمُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَّةِ



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁸

Nabi Muhammad saw. sebagai Rasulullah tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam makna pemenuhan akan kebutuhan materiil atau kebendaan saja, akan tetapi dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan Kepala Negara Madinah, Nabi Muhammad saw. telah menerapkan suatu prinsip kesejahteraan untuk dua macam kepentingan yaitu baik kepentingan kesejahteraan materiil bagi semua warga Negara Madinah maupun kesejahteraan yang bersifat spiritual bagi mereka. Nabi Muhammad saw. telah melaksanakan dan menerapkan suatu prinsip keseimbangan antara kebahagiaan dan kesejahteraan duniawiyah dan ukhrawiyah.⁸⁹ Prinsip ini diajarkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 201 sebagaimana tercantum dalam doa :

⁸⁸ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.288.

⁸⁹

﴿النَّارِ عَذَابٌ وَفَنَّا حَسَنَةً إِلَّا خَيْرَ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِيءَاتِنَا رَبَّنَا يَقُولُ مَنْ وَمَنْهُمْ



Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".⁹⁰

2. Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin

1) Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq (nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr Amr bin Masud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir At-Taimi Al-Qurasyi. Dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Utsman (Abu Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Saad bin Laym bin Mun'ah bin Ka'ab bin Lu'ay, berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah binti Sahr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah. Garis keturunannya bertemu pada neneknya, yaitu Ka'ab bin Sa'ad.⁹¹

Bentuk peradaban yang paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah pengumpulan al-Qur'an.⁹²

⁹⁰Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.49.

⁹¹ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 67.

⁹²*Ibid*, h. 73.

Peradaban Islam pada zaman Abu Bakar dalam pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, ia mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang dan jizyah dari warga negara non muslim, sebagai sumber pendapatan *Baitul Mal*. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapat negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepala rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan al-Quran. Diriwayatkan bahwa Abu-Bakar sebagai khalifah tidak pernah mengambil atau menggunakan uang dari *Baitul Mal*. Karena menurutnya, ia tidak berhak mengambil sesuatu dari *Baitul Mal* umat Islam. Oleh karena itu, selama ia menjadi khalifah, ia tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.⁹³

2) Umar Ibn Al-Khaththab

Umar ibn al-Khaththab, (583-644) yang memiliki nama lengkap Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin Razail bin ‘adi bin Ka’ab bin Lu’ay adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia adalah salah seorang sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad saw. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai *mujtahid* yang ahli

⁹³*Ibid*, h. 74.

dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam banyak hal, Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan genius.⁹⁴

Pada zaman khalifah Umar r.a hukum perdagangan yang bersifat operasional mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Pada dasarnya, hukum-hukum yang bersifat prinsip pada zaman Rasulullah saw telah sempurna. Khalifah Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang. Demikian juga pada saat yang sama, dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana jual-beli yang sehat (persaingan) yang adil. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Umar bin al-Khattab amat tegas dalam masalah zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat atau berkurang ketika pembayarannya akan diperangi.⁹⁵

Terhadap pengaturan *jizyah*, khalifah Umar juga bersifat tegas sebagaimana kisah surat yang diriwayatkan dari Ziad bin Juz'um az-Zubaidi dari Ibnu Jarir tentang pengaturan para tawanan di Mesir. Beliau menulis surat kepada amir pasukan yaitu Amr bin 'Ash, bahwa para tawanan dibebaskan untuk memilih masuk Islam atau tetap memeluk agama mereka. Apabila masuk Islam akan dapat hak-hak seperti hak kaum muslimin lainnya, tetapi apabila tetap memeluk

⁹⁴*Ibid*, h. 77.

⁹⁵Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h.31.

agama mereka, mereka bisa bebas hidup berdampingan dengan kaum muslimin tetapi harus membayar *jizyah*.⁹⁶

Masa pemerintahan ‘Umar dapat dianggap sebagai masa peningkatan kesejahteraan rakyat. Perluasan daerah membawa dampak banyaknya devisa negara yang masuk, baik dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh daerah-daerah yang telah ditundukkan. Karenanya, Umar berusaha memanfaatkan keuangan negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin.⁹⁷

Umar memberi tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak. Untuk itu, pertama kali dalam sejarah Islam, Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah jiwa yang berhak menerima bantuan.⁹⁸

Dalam masalah kesejahteraan rakyatnya, khalifah Umar biasa berkeliling kampung untuk mencari umat Islam yang membutuhkan pertolongan. Pernah beliau menjumpai wanita miskin yang tidak mampu menyediakan makanan untuk anak-anaknya, sehingga beliau bergegas mengambil karung gandum dan dipikulnya sendiri dari baitul mal dan memberikannya kepada wanita tersebut. Pernah pula beliau dan istrinya membantu seorang keluarga yang istrinya akan melahirkan.⁹⁹

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 69.

⁹⁸*Ibid*, h. 70.

⁹⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 32.

Sebelum Umar r.a wafat, beliau telah membentuk dewan atau majelis syura untuk memutuskan pengganti khalifah setelah beliau. Majelis tersebut beranggotakan enam orang yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqas, dan Abdur Rahman bin Auf radhiallahu ‘anhum. Ini menandakan bahwa pada sistem pemilihan khalifah, beliau tidak diktator atau mewariskan kepada keturunannya.¹⁰⁰

3) Utsman Bin Affan

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abd Al-Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 M, enam tahun setelah penyerangan Kabah oleh pasukan bergajah atau enam tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ibu Khalifah Utsman bin Affan adalah Urwy bin Kuraiz bin Habib bin Abdi asy-Syams bin Abd al-Manaf.¹⁰¹

Karya besar monumental Khalifah Utsman adalah membangun mushaf al-Quran. Pembukuan ini didasarkan atas alasan dan pertimbangan untuk mengakhiri perbedaan bacaan di kalangan umat Islam yang diketahui pada saat ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Pembukuan ini dilaksanakan oleh suatu kepanitian yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit.¹⁰²

Utsman tidak banyak merumuskan kebijakan operasional, beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan khalifah Umar tentang

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 86.

¹⁰² *Ibid*, h. 92.

pengelolaan baitul mal, sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiah.¹⁰³ Namun demikian, beliau juga melaksanakan pembangunan di wilayah Islam yang luas itu, meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Semua jalan yang menuju ke Madinah dilengkapi dengan khafilah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabi di Madinah diperluas. Tempat persediaan air dibangun di Madinah, di kota-kota padang pasir, dan di ladang-ladang peternakan unta dan kuda. Pembangunan berbagai sarana umum ini menunjukkan bahwa Utsman sebagai khalifah sangat memerhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat.¹⁰⁴

4) Ali Bin Abi Thalib

Ali adalah putra Abi Thalib ibn Abdul Muthallib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad saw. yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi Muhammad saw. Fatimah, ia telah ikut bersama Rasulullah saw. sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah dan tinggal di rumahnya. Ia masuk Islam ketika usianya sangat muda dan termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan pria. Pada saat Nabi menerima wahyu pertama, Ali berumur 13 tahun, menuurt

¹⁰³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 32.

¹⁰⁴ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 92-93.

A.M. Saban, sedangkan menurut Mahmudunnasir, Ali berumur 9 tahun.¹⁰⁵

Saat menjadi Khalifah, Ali bin Abi Thalib mengirimkan surat edaran kepada beberapa gubernurnya sebagai berikut:

“Demi Allah. uruslah kebutuhan orang-orang yang miskin, menderita, dan cacat, yang tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Keluarkan bagian dari kas pemerintah (baitul mal) dan bagian dari hasil panen di setiap kota. Anda harus memerhatikan secara serius hak-hak mereka. Jangan menelantarkan mereka, karena kalian besar kepala (sombong) kepada mereka. Jangan berdalih dengan kesibukan hingga tidak memerhatikan mereka. Jangan menganggap sepele mereka. Angkatlah petugas terpercaya, saleh, dan rendah hati, yang mengurus mereka. Mintalah pertanggungjawaban setiap petugas yang anda angkat untuk mengurus mereka. Mintalah laporan masalah yang dihadapi mereka. Mereka yang tidak berdaya itu lebih membutuhkan keadilan ketimbang yang lainnya.”¹⁰⁶

Khalifah Ali dalam menjalankan pemerintahannya banyak terjadi konflik kekuasaan, tetapi khalifah Ali juga memikirkan peraturan-peraturan untuk menyempurnakan peraturan pada masa khalifah sebelumnya. Peraturan yang telah beliau sumbangkan untuk pelaksanaan roda kekhilafahan adalah tentang administrasi pemerintah. Bukti dalam hal itu terliht dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik bin Harith, di mana surat itu mendeskripsikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kendali pejabat tinggi dan staf, peraturan hakim, dan jaksa. Hal ini menandakan bahwa disamping seorang khalifah, beliau juga seorang yang ahli

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 95.

¹⁰⁶ H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 39-40.

manajemen. Khalifah Ali r.a meninggal dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan.¹⁰⁷

E. Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat

Menurut Wahid Ra'fat, ahli hukum tata negara negara Mesir, menyebutkan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus kepentingan, dan kemaslahatan umum.¹⁰⁸

Dalam Islam negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut al-Maawardi, pendirian negara ini didasarkan pada *ijma'* ulama, adalah *fardhu kifayah*. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarannya itu hukumnya juga wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).¹⁰⁹

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di

¹⁰⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 33.

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 151.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 151-152.

akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.¹¹⁰

Al-Maududi menjelaskan tujuan pendirian negara dalam Islam dengan mengutip ayat al-Qur'an QS al-Hadid ayat 25 :

قَسَطَ النَّاسُ لِيُقُومَ وَالْمِيزَانُ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ
يَبْزُورُ سُلْهَ رَيْنُصْرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ شَدِيدُ بَأْسٍ فِيهِ الْحَدِيدُ وَأَنْزَلْنَا بِالْأَلْفِ
عَزِيزُ قَوِيٌّ اللَّهُ إِنَّ بَالِغَ

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹¹¹

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pengaturan untuk kemaslahatan rakyat diatur didalamnya.

Didalam siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.904.

dalam perundang-undangan tersebut.¹¹² Dalam sisi lain siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk permasalahan peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, permasalahan administrative dan kepegawaian.¹¹³

Dalam siyasah maliyah adalah mengatur mengenai keuangan negara yang menyangkut kas negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹¹⁴

Sebagaimana didalam Alquran di jelaskan dalam Q.S An-Nisaa (4) : 58 sebagai berikut:¹¹⁵

عَدْلٍ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ أَنْ بِأَل

¹¹² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177

¹¹³ Prof. H.A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, (Jakarta: KENCANA 2013), h. 48.

¹¹⁴ <http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/siyasah-politik-islam.html?m=1> (online 26 Agustus 2019, 12.30)

¹¹⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹¹⁶

F. Prinsip Kesejahteraan

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum salah satunya prinsip kesejahteraan. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah).¹¹⁷

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat

¹¹⁶Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 238.

¹¹⁷Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, dalam jurnal *Al-‘adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 172.

dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah: zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf, dengan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatanS- pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.¹¹⁸

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan (*dhaman i'alah*), yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.¹¹⁹

Abu Hamid Al-Ghazali mengaitkan keadilan kekuasaan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu pemerintahan. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran, dan kesetian rakyat kepada pemerintahan. Menurutnya, bila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi dimana- mana, baik dikota mapun di daerah. Selain itu banyak penduduk yang eksodus ke tempat

¹¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*, h. 150.

¹¹⁹ H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, h. 39.

lain, banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena ditinggalkan penggarapnya, pendapatan masyarakat akan merosot, pemerintahan tidak akan stabil, keuangan negara akan kosong, dan kesejahteraan akan jauh dari masyarakat. Selain itu, hal lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap dimasyarakat.¹²⁰

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladun thayibatun wa rabbun ghafur*" yaitu "suatu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah" negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang tua (orang yang berusia pensiun), beasiswa untuk mereka yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.¹²¹

Dalam nomokrasi Islam, hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam: "*hablun min Allah wa hablun min al-nas*", yaitu aspek ibadah dan aspek *mu'amalah*. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, sesuai dengan perintah Allah swt.¹²²

Oleh karena itu manusia menurut hukum Islam, merupakan makhluk sosial dan politik, kesejahteraannya dalam segala hal terpaut dengan kesejahteraan masyarakat. Organisasi individu yang tertinggi adalah masyarakat. Islam

¹²⁰ *Ibid*, h. 44-45.

¹²¹ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 152.

¹²² *Ibid*.

mewajibkan untuk membentuk suatu masyarakat dan mengusulkan kepada dunia gagasan kemasyarakatan yang praktis. Akhirnya nasib manusia kembali kepada raja yang filosof. Betapa pentingnya menata kembali masyarakat ini, hingga mereka mampu dengan cermat mengawasi tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan seterusnya sepanjang hayat masih mengizinkan.¹²³

G. Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi dan Makna Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal bermakna bahwa hubungan dengan Allah Swt., dan dimensi horizontal bermakna hubungan dengan manusia.¹²⁴

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna النمو – *al-Numuw* (menumbuhkan), الزيادة *al-Ziadah* (menambah), البركة – *Al-Barakah* (memberkatkan), and التطهير *al-Thathhir* (menyucikan).¹²⁵

Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (النماء *an-nama*) atau “pensucian” (at-tathhir). Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.¹²⁶

¹²³ Khalifah Abdul Hakim, *Hidup yang Islam Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah dan Ubudiah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h.241-242.

¹²⁴ Zaki ‘Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, dalam *jurnal Al-‘adalah*, Vol. VII, No. 3 Juni 2015, h. 642.

¹²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 103.

¹²⁶ *Ibid*, h. 104.

Sedangkan, zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹²⁷

Zakat dalam perspektif fiqih dikategorikan sebagai ibadah *'itiqadiyah maliyah*, ibadah yang melibatkan unsur keimanan (hati) dan kekayaan (harta). Dalam arti ini, maka zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beriman dan memiliki kekayaan, atau orang Islam yang kaya. Tujuannya, selain untuk mensucikan dan menjadikan kekayaan itu menjadi berkah, juga untuk berbagi hak dengan orang miskin, sehingga pemilikan kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya. Setidaknya, orang-orang miskin dapat merasakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan tersebut, bahkan kalau mungkin mereka ikut terangkat menjadi orang kaya.

Dengan demikian, zakat adalah ibadah yang secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.¹²⁸

Zakat terkadang disebut dengan kata sedekah, sehingga zakat bermakna sedekah dan sedekah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun

¹²⁷ H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 3.

¹²⁸ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 11.

memiliki makna yang sama. Makna ini di antaranya bisa ditemui di dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 :

أَبِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
كَيْمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَّةِ



Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah:60)¹²⁹

Islam mewajibkan zakat sebagai sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bisa memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti kebutuhan materilnya (sandang pangan), kebutuhan psikologinya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi).¹³⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum dan dalil al-Qur'an diperoleh melalui beberapa ayat di dalam al-Qur'an, di antaranya firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah ayat 43 :

الرَّكْعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

¹²⁹Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

¹³⁰ Oni Sahroni, et. Al. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), h. 71.

*Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (QS Al-Baqarah:43)*¹³¹

Dalam Surat At Taubah ayat 103

لِلّٰهِ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ اِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً اَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعًا وَآ

*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)*¹³²

Dalam Surat Al Baqarah ayat 277 :

هُمْ لَهُمُ الزَّكَاةُ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبَّهُمْ عِنْدَ أَجْرٍ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS Al-Baqarah:277)*¹³³

Zakat, juga memiliki peranan penting dalam pembangunan tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin, mencetak mereka menjadi suatu kekuatan yang produktif, dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang kurang mampu, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Allah swt berfirman dalam Surah al Hasyr ayat 7 :

¹³¹Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 16.

¹³²*Ibid*, h. 297-298.

¹³³*Ibid*, h. 69.

يَكِينٍ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلَرَسُولٍ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٍ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءٌ مَا
 وَهُوَ الرُّسُولُ أَتَنَكُمُ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسَدِ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَفَانْتَهُوَ عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخُذْ

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr:7)¹³⁴

Dengan zakat ini pula kaum dhuafa bisa menikmati kehidupan ini, menunaikan kewajibannya kepada Allah swt. tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan pada saat yang sama kaum dhuafa telah diperlakukan sebagai entitas masyarakat yang terhormat, bukan lagi terpinggirkan karena orang-orang mampu di masyarakat tersebut membantunya dengan zakat yang menjadi hak kaum dhuafa.¹³⁵

3. Pembagian Zakat Kepada Para Penerima yang Berhak

Tentang pembagian zakat kepada para penerima yang berhak, adalah kepada kelompok orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah At Taubah ayat 60 yang artinya :

أَبِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 كَيْمُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَّةِ



¹³⁴ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 916.

¹³⁵ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, h.71.

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah:60)¹³⁶

Sebelumnya Rasulullah saw. membagi-bagikan zakat berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, sehingga sebagian orang munafik ada yang berkata kepada beliau, “Berlaku adillah wahai Rasulullah,” maka Rasulullah SAW. menjawab,


 ثَكَلْتُكَ أُمُّكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ
“Celaka engkau! Jika aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud)¹³⁷

Maka zakat hewan ternak, sepersepuluh hasil pertanian, buah-buahan, zakat harta, barang tambang, dan seperlima rikaz, wajib dipungut, karena seluruhnya adalah zakat yang dipungut selanjutnya diberikan kepada delapan kelompok tadi, jika mereka ada.¹³⁸ Delapan penerima zakat tersebut adalah

- 1) *Al fuqaha*.¹³⁹
- 2) Orang-orang yang miskin.¹⁴⁰
- 3) Amil zakat.¹⁴¹

¹³⁶ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 288.

¹³⁷ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran slam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 239.

¹³⁸ *Ibid*, h. 240.

¹³⁹ Al Jazairy, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Saudi Arabia: H. I Press, 1996), h. 75.

¹⁴⁰ *Ibid*.

¹⁴¹ *Ibid*, h. 76.

4) *Ar-Riqab*.¹⁴²

5) Orang yang mempunyai hutang.¹⁴³

6) *Fi sabilillah*.¹⁴⁴

7) *Muallaf*,

8) Ibnu Sabil.¹⁴⁵

4. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁴⁶

Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah

1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.¹⁴⁷

2) Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq, lainnya kearah kehidupannya yang

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ *Ibid*, h. 78.

¹⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara*, h. 242.

¹⁴⁵ Al Jazairy, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, h.79.

¹⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 9-10.

¹⁴⁷ H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 47.

lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak¹⁴⁸

- 3) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim.¹⁴⁹
- 4) Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai (*marhamah*) di atas prinsip *ukhuwah Islamiyyah* dan *takaful ijtima'i*.¹⁵⁰
- 5) Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (*tazkiyatun nafs*), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.¹⁵¹
- 6) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.¹⁵²
- 7) Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan

¹⁴⁸ *Ibid*, h. 48.

¹⁴⁹ *Ibid*.

¹⁵⁰ *Ibid*.

¹⁵¹ *Ibid*.

¹⁵² *Ibid*, h. 49.

sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.¹⁵³



¹⁵³*Ibid.*

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Kali Balau Kencana

Sejarah terbentuknya Kelurahan Kali Balau Kencana pada tahun 2001, yakni pada saat itu wilayah Kelurahan Kalibalau Kencana ini masih berstatus Kelurahan Tanjung Baru yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.¹⁵⁴

Pada Tahun 2001 Kelurahan Tanjung Baru di bagimenjadi 2 Kelurahan yaitu Tanjung Baru dan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sejak tanggal 27 Januari 2001.¹⁵⁵

Wilayah Kelurahan Kali Balau Kencana ini adalah pemekaran dari Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung disebut Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.¹⁵⁶

Dasar pemekaran Kelurahan Kali Balau Kencana adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor

¹⁵⁴ *Dokumentasi*, Kelurahan Kali Balau Kencana, dicatat tanggal 15 Februari 2019.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

01 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.¹⁵⁷

Adapun nama-nama tokoh/pemimpin/lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Nama Lurah Kelurahan Kali Balau Kencana

No	Nama Lurah	Tahun Pemerintahan
1.	Uripno. AK. SH	2001 s/d 2005
2.	Kulhaq, S.Sos	2005 s/d 2009
3.	Fariana. S.IP	2010 s/d 2014
4.	Agusmansyah. S.IP	2015 s/d sekarang

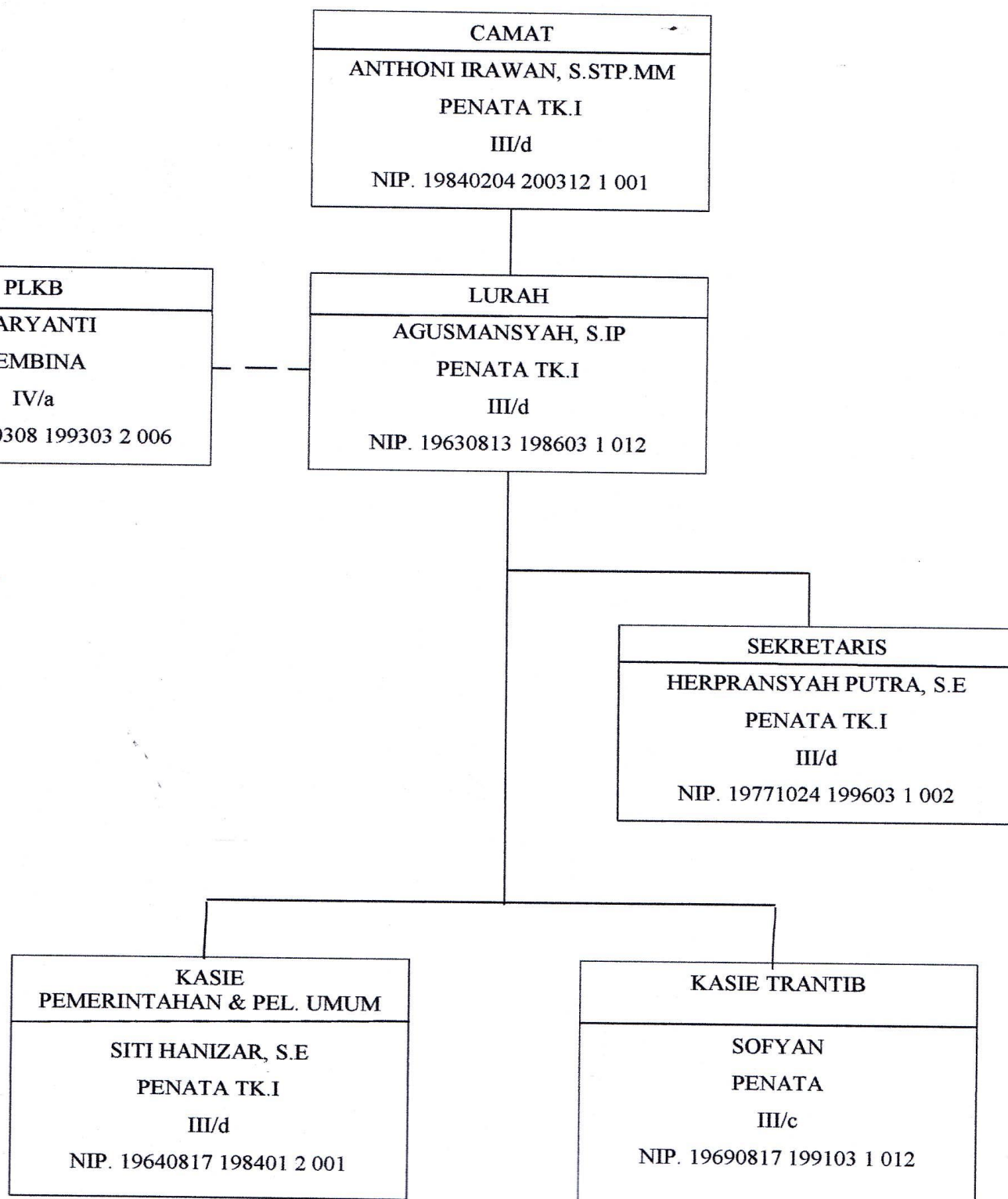
Sumber: Profil Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018



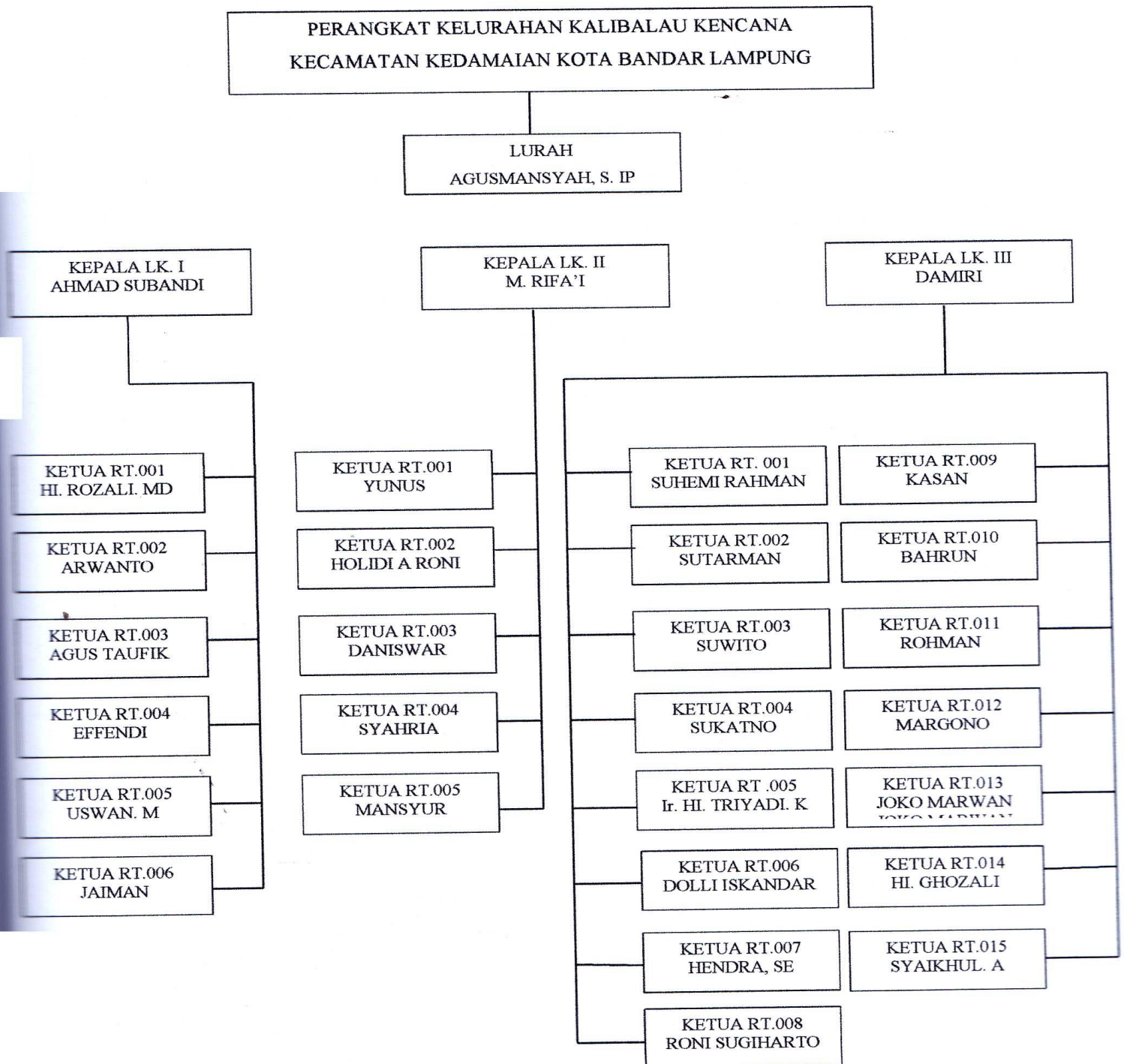
¹⁵⁷ Herpransyah Putra, Wawancara Sekretaris Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, pada tanggal 11 Juli 2019.

2. Struktur Kelurahan Kali Balau Kencana Dan Perangkat Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung

GAMBAR I
STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KALI BALAU KENCANA
KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG



GAMBAR II
PERANGKAT KELURAHAN KALI BALAU KENCANA KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG



3. Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Kali Balau Kencana

Dibawah ini menjelaskan terkait batas wilayah, luas wilayah menurut penggunaannya, luas tanah fasilitas umum, dan topografi.

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Way Halim Permai
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Kedamaian
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarame dan Kelurahan Sukabumi Indah
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya III dan Kelurahan Tanjung Baru.

b. Luas Wilayah menurut Penggunaannya :

- 1) Luas Pemukiman : 149 ha/m²
- 2) Luas Kuburan : 1 ha/m²
- 3) Luas Pekarangan : 5,74 ha/m²
- 4) Perkantoran : 0,5 ha/m²
- 5) Prasarana Umum Lainnya : 4,5 ha/m²

c. Luas Tanah Fasilitas Umum :

- 1) Lapangan Olahraga : 0,25 ha/m²
- 2) Perkantoran Pemerintah : 0,5 ha/m²
- 3) Pemakaman umum : 1 ha/m²
- 4) Bangunan Sekolah : 2 ha/m²
- 5) Luas Pertokoan : 3,5 ha/m²
- 6) Luas Jalan : 4,5 ha/m²

d. Topografi :

- 1) Dataran Rendah : 6 ha/m²
- 2) Aliran Sungai : 5 ha/m²
- 3) Kawasan Pertokoan Bisnis : 1 ha/m²
- 4) Desa Rawan Banjir : 5 ha/m²

4. Potensi Sumber Daya Manusia Kelurahan Kali Balau Kencana

Dibawah ini tabel yang menjelaskan terkait jumlah penduduk dan rata-rata usia di Kelurahan Kali Balau Kencana, pendidikan, mata pencaharian, agama, suku.

a. Jumlah Penduduk dan Rata-rata Usia

Data jumlah penduduk masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Umur Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2019

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	223	215	438
2	5-6 Tahun	189	163	352
3	7-13 Tahun	475	481	956
4	14-16 Tahun	576	528	1104
5	17-24 Tahun	783	835	1618
6	25-54 Tahun	1973	1974	3947
7	55 Tahun Keatas	400	406	806
	Jumlah	4619	4602	9221

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

b. Pendidikan

Di bawah ini adalah tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana :

Tabel 3
Jumlah KK Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	315	260	575
2	Sarjana Muda	401	371	772
3	SLTA	980	926	1906
4	SLTP	1299	1333	2632
5	SD	1279	1363	2642
6	TK	149	173	322
7	Belum Sekolah	196	176	372
	Jumlah	4619	4602	9221

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

Pada tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kali Balau Kencana masyarakatnya mayoritas sudah merasakan di bangku sekolah, tetapi hanya sebatas sampai di bangku SLTA saja.

c. Mata Pencarian

Apabila dilihat keadaan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya memiliki berbagai macam pekerjaan. Dibawah ini akan dijelaskan tabel dari pekerjaan masyarakat Kelurahan Kali Balau Kencana

Tabel 4
Mata Pencaharian Berdasarkan KK di Kelurahan Kali Balau Kencana

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	105	60	165
2	TNI/POLRI	35	2	37
3	Dagang	243	120	363
4	Tukang	265	-	265
5	Buruh	756	145	901
6	Pensiun	37	30	67
7	Lain-lain	3178	4245	7423
	Jumlah	4619	4602	9221

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

Dilihat dari tabel diatas mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana adalah sebagian besar buruh.

d. Agama

Keyakinan beragama penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Agama

No	Agama Yang Dianut	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	4122	4135	8257
2	Kristen	207	201	408
3	Katholik	120	114	234
4	Budha	157	142	299
5	Hindu	13	10	23
	Jumlah	4619	4602	9221

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat mayoritas masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana adalah beragama Islam.

e. Suku

Jumlah suku yang ada di Kelurahan Kali Balau Kencana dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Laki-Laki	Perempuan
1	Aceh	8 orang	9 orang
2	Batak	50 orang	47 orang
3	Melayu	3 orang	2 orang
4	Minang	120 orang	101 orang
5	Betawi	9 orang	8 orang
6	Sunda	375 orang	370 orang
7	Jawa	1335 orang	1972 orang
8	Madura	25 orang	27 orang
9	Bali	12 orang	11 orang
10	China	261 orang	245 orang
11	Lampung	751 orang	661 orang
12	Banten	1025 orang	975 orang
13	Palembang	175 orang	170 orang
14	Dll	170 orang	88 orang
	Jumlah	4319 orang	4319 orang
	Jumlah Total		9005 orang

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

Kelurahan Kali Balau Kencana lebih banyak suku Jawa dibandingkan dengan masyarakat pribumi Lampung.

5. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kali Balau Kencana

Berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kali Balau Kencana, dapat dilihat dibawah ini urutan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana

Tabel 7
Data Keluarga Miskin

No	Lingku ngan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarg a Sejahter a III Plus	Juml ah
1	I	3	4	5	8	7	8
2	II	184	62	220	44	11	521
3	III	159	82	91	50	19	401
4	IV	141	156	167	157	41	662
5	Jumlah	484	300	478	251	71	1584

Sumber: Data Kelurahan Kali Balau Kencana Tahun 2018

Data keluarga miskin di Kelurahan Kali Balau Kencana menempati urutan pertama dimana masyarakatnya belum sejahtera.

B. Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan

Pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) bersama lintas sektoral mulai bulan Juli 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), namun Program tersebut belum tersebar ke semua Provinsi di Indonesia hanya dibeberapa provinsi saja.

Kebijakan tentang bantuan sosial PKH diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non

tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.¹⁵⁸

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 1 Ayat 1 yakni Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁵⁹

2. Sasaran Penerima Bantuan Sosial PKH

Sasaran penerima bantuan sosial PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
- c. Perbatasan antar negara.¹⁶⁰

¹⁵⁸Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Loc. Cit.*

¹⁵⁹*Ibid*, h. 129.

¹⁶⁰*Ibid*, h. 4.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan yakni pada Pasal 2 berisi kriteria penerima bantuan sosial PKH yaitu:

- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana pada pasal 3 meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana pada Pasal 3 meliputi :
 - 1) Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2) Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - 3) Anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana Pasal 3 meliputi :
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.¹⁶¹

4. Tujuan Bantuan Sosial PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

¹⁶¹*Ibid.*

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹⁶²

5. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Dalam pelaksanaan PKH, KPM sebagai penerima bantuan sosial PKH mempunyai kewajiban sebagaimana berikut :

- a. Bayi Usia 0-11 Bulan
 - 1) Pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama
 - 2) ASI Eksklusif 6 bulan pertama kelahiran
 - 3) Imunisasi lengkap
 - 4) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan
 - 5) Mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6-11 bulan
 - 6) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
- b. Usia 1 s.d < 5 tahun
 - 1) Imunisasi tambahan
 - 2) Penimbangan berat badan tiap bulan
 - 3) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun

¹⁶²*Ibid.*

4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

5) Pemberian kapsul vit A 2 kali dalam setahun

c. Anak usia dini

1) Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun

2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun

3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

d. Anak SD, SMP, SMA

Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA) :

1) Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan

2) Minimal 85% kehadiran dikelas

e. Ibu Hamil

1) Pemeriksaan kehamilan di faskes minimal 4 kali selama kehamilan

2) Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan

3) Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.

f. Penyandang Disabilitas

Pihak keluarga/pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali :

1) Layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat)

- 2) Layanan *home care* (pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH)

g. Lanjut Usia

- 1) Memastikan pemeriksaan kesehatan
- 2) Penggunaan layann Puskesmas Santun Lanjut Usia
- 3) Layanan *home care* (pengurus merawat memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia)
- 4) *Day Care* (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal (lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.¹⁶³

6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi dari daerah dapat di input, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan, Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan

¹⁶³ *Ibid.*

validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.¹⁶⁴

Tahap penyaluran bantuan sosial PKH menurut A. Arya Budiman adalah sebagai berikut¹⁶⁵ :

a. Proses validasi data warga

Proses validasi data warga adalah pengajuan nama-nama warga siapa saja yang akan menjadi calon penerima bantuan PKH, teknis nya dengan mengumpulkan data diri seperti KTP, KK. Proses validasi ini merupakan seleksi untuk memilih warga yang layak mendapatkan bantuan PKH. Data validasi ini didapatkan dari Kelurahan yang kemudian akan diseleksi oleh Kementrian Pusat siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut.

b. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

Setelah nama-nama yang sudah diseleksi muncul, baru dilakukan pembukaan rekening dengan Bank yang bekerja sama. Setiap daerah Bank yang digunakan berbeda-beda, untuk di Bandar Lampung sendiri menggunakan Bank BRI.

c. Sosialisasi dan edukasi

Setelah pembukaan rekening selesai, pendamping PKH mengundang warga-warga yang sudah terpilih menjadi peserta PKH untuk pertemuan awal, lalu pendamping PKH melakukan sosialisai dan edukasi terkait PKH tersebut.

¹⁶⁴ *Ibid*, h.6.

¹⁶⁵ A. Arya Dimantara, Wawancara Pendamping sosial PKH, pada tanggal 23 Februari

d. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Setelah melakukan pertemuan awal sosialisasi lalu tahap selanjutnya pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara mengundang kembali warga tersebut kemudian di berikan penjelasan dan arahan sekaligus warga tersebut diberikan kartu KKS beserta buku tabungannya.

e. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH

Setelah kartu KKS dan buku tabungan di terima oleh warga selanjutnya yaitu menunggu proses penyaluran bantuan sosial, mekanismenya bantuan sosial itu dananya langsung masuk ke rekening yang ada di kartu KKS masing-masing warga.

f. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH

Setelah dana bantuan PKH itu masuk ke rekening warga masing-masing, pendamping PKH mengedukasi cara pencairannya yaitu langsung ke mesin ATM yang tersebar didaerah tersebut.

g. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH

Rekonsiliasi ini untuk mengetahui penyaluran bantuan PKH lancar atau tidak, bermasalah atau tidak, apakah ada saldo nol, apakah ada dana bantuan yang tidak masuk ke rekening warga. Yang nantinya pendamping PKH laporkan.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid.*

7. Informasi tentang Bantuan Program Keluarga Harapan

a. Penarikan Bantuan Program Keluarga Harapan

- 1) Dana bantuan Sosial PKH disalurkan ke rekening KPM dalam bentuk tabungan yang penggunaanya dapat menggunakan Kartu Elektronik Kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditarik secara tunai. Apabila dana bantuan sosial PKH tidak dicairkan oleh KPM di periode tersebut, maka nilai bantuan PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Rekening Tabungan KPM PKH.
- 2) Biaya Penarikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan KPM tidak dikenakan biaya untuk 2 (dua) kali transaksi pada setiap tahanan penyaluran PKH di Agen Bank penerbit KKS.
- 3) Lokasi Penarikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan KPM dapat menarik/mencairkan bantuan sosial PKH dengan menggunakan KKS melalui agen bank, Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong), ATM atau kantor cabang/unit Bank terdekat.¹⁶⁷

b. Peran e-warong dalam Penyaluran PKH

- 1) Menjadi perpanjangan tangan dari bank penyalur dalam program bantuan sosial secara non tunai.
- 2) Mensosialisasikan penggunaan instrument KKS kepada penerima bantuan PKH.

¹⁶⁷Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Op.Cit*, h. 27.

- 3) Sebagai media penghubung bagi penerima bantuan PKH dalam penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan kendala teknis penarikan bantuan PKH.
- 4) Mengedukasi penerima bantuan PKH tentang produk dan jasa keuangan.¹⁶⁸

c. Electronic Data Capture (EDC)

Mesin EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek KKS serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya.¹⁶⁹

d. Personal Identification Number (PIN)

- 1) PIN adalah nomor identifikasi pribadi atau kode rahasia yang terdiri dari 6 angka sebagai kunci penggunaan KKS untuk melakukan transaksi pencairan Bantuan PKH oleh penerima bantuan PKH.
- 2) PIN KKS harus di jaga kerahasiannya dengan tidak memberitahukan kepada siapapun.¹⁷⁰

e. Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan

1) Koordinator Kabupaten/Kota

a) Tugas

Koordinator Kabupaten/Kota adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial RI yang bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid*, h. 28.

¹⁷⁰ *Ibid.*

mengordinir sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten/kota.

b) Peran

Adapun peran Koordinator Kabupaten/Kota khusus terkait penyaluran PKH adalah:

- Mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta/dokumen PKH lainnya di Kabupaten/Kota lokasi tugas.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota lokasi tugas.

2) Pendamping Sosial PKH

a) Tugas

Pendamping Sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

b) Peran

Pendamping Sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni:

- Pertemuan Awal
- Validasi
- Pemutakhiran Data
- Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan
- Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota
- Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
- Melaksanakan penanganan pengaduan
- Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan

3) Asisten Pendamping Sosial

a) Tugas

Asisten Pendamping Sosial adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk membantu pelaksanaan tugas pendamping sosial di tingkat kecamatan.

b) Peran

Peran Asisten Pendamping Sosial terkait dengan PKH adalah membantu tugas Pendamping Sosial.

f. Perlindungan KPM/Konsumen

Cara aman menggunakan KKS:

- 1) Hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nomor telepon.
- 2) Menjaga kerahasiaan PIN dengan tidak memberitahukan kepada siapapun.
- 3) Simpan KKS ditempat aman, jika KKS hilang, KPM atau melalui Pendamping Sosial PKH segera hubungi call center bank penyelenggara dan/atau mengunjungi Unit Kerja/Kantor Cabang Bank Penyalur terdekat untuk segera melakukan pemblokiran kartu.¹⁷¹

8. Layanan dan Pengaduan

a. Penggantian PIN

- 1) Untuk melakukan penggantian PIN, KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa Kartu KKS, Buku Tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening KKS, Identitas asli.
- 2) Pihak Bank akan mereset PIN dan KPM memasukan PIN baru kemudian aktivitas perubahan PIN dicatat dalam log book.

b. Penggantian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- 1) Kriteria kartu rusak adalah kerusakan secara fisik dan/atau tidak digunakan di 2 agen bank.
- 2) Dalam hal Kartu Keluarga Sejahtera Rusak, maka:

¹⁷¹*Ibid*, h. 28-30.

- a) KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa KKS yang Rusak, buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening KKS, dan Identitas asli.
 - b) Pihak KPM mengembalikan KKS yang rusak kepada pihak Bank kemudian digunting dan dicatat dalam log book.
- 3) Dalam hal Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang, maka:
- a) KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening KKS, Identitas asli, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
 - b) Penggantian KKS karena hilang dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,- oleh pihak Bank Penyalur.
 - c) Proses penggantian kartu memerlukan waktu selama 14 hari kerja.
 - d) Dalam hal KPM sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit maka, KPM dapat memberikan kuasa kepada Pendamping untuk melakukan proses penggantian KKS kepada Bank Penyalur sebagaimana prosedur dalam butir c diatas.
- c. Penggantian Buku Tabungan
- 1) Dalam hal Buku Tabungan habis pakai, maka KPM datang ke KC Bank Penyalur dengan membawa Identitas asli, KKS dan Buku Tabungan yang lama (yang akan diganti).
 - 2) Dalam hal Buku Tabungan hilang, maka KPM wajib mengisi form penggantian buku tabungan di Bank Penyalur dan tanda tangan basah/cap jari di form penggantian buku tabungan, menyampaikan

Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, dan membawa identitas asli serta KKS.

- 3) Bank Penyalur menindaklanjuti penggantian buku tabungan dengan proses 1 hari kerja dan penggantian buku tabungan karena hilang dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,- oleh pihak Bank Penyalur.

d. Saldo KKS Nihil

- 1) KPM agar segera menyampaikan pengaduan mengenai saldo KKS nihil kepada Kantor Cabang Penyalur setempat. Pendamping maupun Dinas Sosial setempat memberikan pendampingan selama proses penyelesaian kartu saldo KKS nihil.
- 2) Tata cara penyelesaian permasalahan mengenai saldo KKS nihil mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan OJK terkait perlindungan konsumen.

e. Jaringan off-line

- 1) Dalam hal jaringan offline telah melampaui 7x24 jam, KC Bank Penyalur harus melapor kepada Dinsos Kab/Kota setempat untuk tindak lanjut.

Selama masa jaringan offline, transaksi penarikan dapat dilakukan di agen lain terdekat.¹⁷²

¹⁷² *Ibid*, h. 30-31.

C. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kali Balau Kencana dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan mulai di realisasikan di kota Bandar Lampung pada tahun 2011 dimana Tahun 2010 sudah mulai diadakannya perekrutan SDM PKH.¹⁷³

Pelaksanaan Bantuan Sosial PKH di Bandar Lampung bertahap setiap tahunnya, yaitu Tahun 2011 sebelum adanya pemekaran kecamatan, hanya ada di 13 kecamatan saja. Lalu di tahun 2019 ini setelah adanya pemekaran kecamatan, bantuan sosial PKH sudah mulai merata di Bandar Lampung, yakni ada di 20 Kecamatan. Kecamatan pemekaran tersebut salah satunya Kecamatan Kedamaian yang didalamnya ada Kelurahan Kali Balau Kencana. Kelurahan Kali Balau Kencana ini sebelumnya masuk di Kecamatan Tanjung Karang Timur namun setelah pemekaran maka di pecah dan Kelurahan Kali Balau Kencana ini masuk ke Kecamatan Kedamaian.¹⁷⁴

Bantuan sosial PKH yang diberikan KPM di Kelurahan Kali Balau Kencana sudah mulai di salurkan ke KPM pada Tahun 2011 yang pada saat itu bantuan yang disalurkan masuk di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Lalu setelah adanya pemekaran, Kelurahan Kali Balau Kencana masuk di dalam Kecamatan Kedamaian dan mulai direalisasikan bantuan sosial PKH pada tahun 2015 di Kelurahan Kali Balau Kencana.¹⁷⁵

¹⁷³ Arief Hidayat, Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung, pada tanggal 25 Februari 2019.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

Penyaluran bantuan PKH pertama kali diberikan lewat Kantor POS dan pada akhir tahun 2016 sudah menggunakan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara) yakni di Kota Bandar Lampung menggunakan Bank BRI. Bantuan PKH ini merupakan bantuan bersyarat yaitu dengan komponennya sebagai berikut:

Tabel 8
Komponen dan Kategori Program Keluarga Harapan

No	Komponen	Kategori
1	Kesehatan	1. Ibu Hamil/Nifas 2. Anak Usia 0-6 tahun
2	Pendidikan	3. SD/Sederajat 4. SMP/Sederajat 5. SMA/Sederajat
3	Kesejahteraan Sosial (Kesos)	6. Lanjut Usia 60 tahun keatas 7. Disabilitas Berat

Sumber: Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung.¹⁷⁶

Bantuan sosial PKH masing-masing disetiap Kecamatan dan Kelurahan mempunyai pendamping sosial yang bertujuan untuk mensosialisasikan bantuan PKH dan untuk mendampingi saat bantuan tersebut hendak disalurkan ke KPM masing-masing di setiap daerah. Pendamping sosial PKH di Kelurahan Kali Balau pada awalnya terdapat dua pendamping seiring berjalannya waktu dan di Tahun 2019 hanya terdapat satu pendamping yakni Baiti Ekawati.¹⁷⁷

Jumlah bantuan sosial PKH setiap tahun mengalami perbedaan yakni seperti penjelasan dibawah ini :

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Baiti Ekawati, Wawancara Pendamping sosial PKH, pada tanggal 25 Maret 2019.

1. Bantuan Sosial Pada Tahun 2016

Tabel
Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2016

No	Komponen	Kategori	Bantuan Komponen
1	Kesehatan	Ibu Hamil	Rp 1.200.000
		Anak usia 0-6 tahun	Rp 1.200.000
2	Pendidikan	SD/Sederajat	Rp 450.000
		SMP/Sederajat	Rp 750.000
		SMA/Sederajat	Rp 1.000.000
3	Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Lanjut Usia	Rp 1.200.000
		Penyandang Disabilitas	Rp 2.400.000

Sumber: Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung

Bantuan sosial PKH Tahun 2016 untuk kategori Kesehatan dan pendidikan dana bantuan dapat dicairkan ke dalam empat pencairan dalam setahun. Sedangkan untuk kategori Kesejahteraan Sosial bantuan dapat dicairkan tiga kali dalam setahun.¹⁷⁸ Tahun 2016 jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana ada 248 orang.¹⁷⁹

2. Bantuan Sosial Pada Tahun 2017

Tahun 2017 bantuan sosial PKH mengalami kenaikan dan setiap komponen mendapat bantuan sama rata yaitu Rp 1.900.000, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

¹⁷⁸Wawancara, Arief Hidayat.

¹⁷⁹Dokumentasi, Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung, tanggal 15 Juli 2019.

Tabel
Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2017

No	Komponen	Kategori	Bantuan Tetap	Bantuan Komponen
1	Kesehatan	Ibu Hamil	Rp 500.000	Rp 1.400.000
		Anak usia 0-6 tahun	Rp 500.000	Rp 1.400.000
2	Pendidikan	SD/Sederajat	Rp 500.000	Rp.1.400.000
		SMP/Sederajat	Rp 500.000	Rp.1.400.000
		SMA/Sederajat	Rp 500.000	Rp.1.400.000
3	Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Lanjut Usia	Rp 500.000	Rp.1.400.000
		Penyandang Disabilitas	Rp 500.000	Rp.1.400.000

Sumber: Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung

Bantuan sosial tahun 2017 dapat dicairkan pada empat tahap dalam setahun yakni tahap penyaluran pertama sebesar Rp 500.000, kedua Rp 450.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 450.000.¹⁸⁰ Tahun 2017 jumlah penerima bantuan sosial PKH ada 242 orang, ini merupakan data dari tahun 2016 dan di tahun 2017 berkurang 6 orang.¹⁸¹

2. Bantuan Sosial Pada Tahun 2018

Tahun 2018 bantuan sosial yang disalurkan mengalami penurunan dan setiap komponen tetap mendapatkan bantuan yang sama, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

¹⁸⁰Wawancara, Arief Hidayat.

¹⁸¹Dokumentasi Program Keluarga Harapan.

Tabel
Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2018

No	Komponen	Kategori	Bantuan Tetap	Bantuan Komponen
1	Kesehatan	Ibu Hamil	Rp 500.000	Rp 1.390.000
		Anak usia 0-6 tahun	Rp 500.000	Rp 1.390.000
2	Pendidikan	SD/Sederajat	Rp 500.000	Rp 1.390.000
		SMP/Sederajat	Rp 500.000	Rp 1.390.000
		SMA/Sederajat	Rp 500.000	Rp 1.390.000
3	Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Lanjut Usia	Rp 500.000	Rp 1.390.000
		Penyandang Disabilitas	Rp 500.000	Rp 1.390.000

Sumber: Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung

Bantuan sosial tahun 2018 tersebut dapat dicairkan pada empat tahap dalam setahun yakni tahap pertama Rp 500.000, kedua Rp 500.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 390.000.¹⁸² Tahun 2018 jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana ada 273 orang ini merupakan data gabungan dari tahun 2017 dan tahun 2018 bertambah 31 orang.¹⁸³

3. Bantuan Sosial Tahun 2019

Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial yang disalurkan meningkat dan setiap komponen mendapat bantuan yang berbeda-beda, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Dokumentasi Program Keluarga Harapan.

Tabel
Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2019

No	Komponen	Kategori	Bantuan Tetap PKH Reguler	Bantuan Tetap PKH Akses	Bantuan Komponen
1	Kesehatan	Ibu Hamil	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 2.400.000
		Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 2.400.000
2	Pendidikan	SD/Sederajat	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000
		SMP/Sederajat	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
		SMA/Sederajat	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
3	Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Penyandang Disabilitas Berat	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 2.400.000
		Lansia 60 Tahun ke Atas	Rp 550.000	Rp 1.000.000	Rp 2.400.000

Sumber: Wawancara Koordinator Operator PKH Bandar Lampung

Bantuan sosial yang disalurkan ke KPM ada 2 yakni bantuan tetap dan bantuan komponen setiap jiwa. Bantuan tetap diberikan hanya pada tahap pertama sedangkan bantuan komponen setiap jiwa dicairkan 4 tahap dalam setahun. Bantuan tetap terbagi menjadi 2 yaitu bantuan tetap PKH Reguler untuk masyarakat yang di daerah umum dan mudah di jangkau dan bantuan tetap PKH akses untuk masyarakat yang lokasinya di daerah terisolasi dan susah di jangkau.¹⁸⁴ Tahun 2019 penerima bantuan sosial PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana ada 292, ini merupakan data gabungan dari tahun 2018 dan tahun 2019 ini bertambah 19 orang.¹⁸⁵

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Dokumentasi Program Keluarga Harapan.

Bantuan yang diterima masyarakat Kelurahan Kali Balau Kencana rata-rata adalah komponen pendidikan yakni

- a. Tingkat SD :Yuli, Samini, Yani Suryani, Rina Pujiastuti, Astuti, Nikmah, Marhanah, Janah, Lilis,
- b. Tingkat SMP :Rina Pujiastuti, Astuti, Agustina, Marhanah, Samilah, Samini,
- c. Tingkat SMA :Yani Suryani, Nikmah, Lilis, Asnawati, Marlina

Dari pernyataan ibu Rina Pujiastuti bahwa syarat pengambilan bantuan sosial PKH harus mengikuti kewajiban dari atasan yakni dalam komponen pendidikan mereka harus ada bukti bahwa mereka benar-benar menyekolahkan anak mereka dengan melampirkan pernyataan surat dari sekolah masing-masing anak.¹⁸⁶

Bantuan sosial PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana dikatakan belum merata dan masih saja ada faktor penghambat dalam penyaluran bantuan yakni masih sering terjadi penerima bantuan sosial tersebut yang salah sasaran.

Menurut pernyataan warga di Jalan Pangeran Antasari Gang Waru I,ibu Yulianawati, ibu Supriyati, ibu Lia Susanti bantuan tersebut masih belum merata dan seharusnya bantuan sosial PKH harus tepat sasaran dimana bantuan tersebut merupakan implementasi untuk menanggulangi kemiskinan, namun pada praktiknya banyak warga yang mengeluhkan dengan bantuan

¹⁸⁶Rina Pujiastuti, Wawancara Ketua Anggota Penerima Bantuan Sosial PKH, pada tanggal 26 Maret 2019.

tersebut karena tidak sesuai dengan sasaran.¹⁸⁷ Seperti apa yang diungkapkan oleh ibu Indrayati, bahwa ada salah seorang warga yang mempunyai kontrakan dan dapat dikatakan mampu namun masih mendapatkan bantuan tersebut.¹⁸⁸

Sedangkan di Jalan Pangeran Antasari Gang Family banyak sekali warga yang mengeluhkan bantuan tersebut, salah satu nya Rina Pujiastuti, beliau berkata bahwa bantuan tersebut belum merata dan belum tepat sasaran, sebagai ketua anggota PKH ibu Rina sudah pernah mengumpulkan data warga miskin dan mengajukannya ke RT dan kelurahan namun sampai sekarang belum ada kabar dan sampai sekarang anggota PKH belum bertambah.¹⁸⁹

Selain ibu Rina Pujiastuti, ada warga Jalan Pangeran Antasari Gang Family yang mengeluhkan tentang bantuan sosial ini, mereka berkata bahwa bantuan sosial PKH ini yang dapat orangnya hanya itu-itu saja, bahkan warga yang mempunyai kendaraan roda empat pun masih mendapat bantuan PKH ini, begitu pula dengan bantuan yang lain seperti bantuan Kartu Pintar, KIS, RASTRA orang nya pun itu-itu saja yang dapat. Selain itu ada warga yang mengkomplain bahwa seharusnya mereka lah yang berhak atas bantuan tersebut seperti ibu Mayla, Ibu Cucu Irawati, Ibu Aninda Novianti, Ibu Amelia, Ibu M. Sisilia Susanti mereka berkata bahwa mereka telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut ke RT,

¹⁸⁷ Yulianawati, Supriyati, Lia Susanti, Fitri, Wawancara Penerima Bantuan Sosial PKH, pada tanggal 25 Juni 2019.

¹⁸⁸ Indrayati, Wawancara Penerima Bantuan Sosial PKH, pada tanggal 25 Juni 2019

¹⁸⁹ Wawancara, Rina Pujiastuti.

ke kelurahan bahkan ke Dinas Sosial.¹⁹⁰ Ditegaskan kembali oleh pernyataan Ibu Yunita Dewi bahwa mereka sudah berkonsultasi kepada pendamping PKH namun tidak ada respon yang baik dari pendamping PKH tersebut dan sampai sekarang hasilnya nihil. Disini saya merasa iri dengan adanya bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran ini, bahkan kami yang mengontrak rumah tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang mempunyai rumah sendiri masih mendapatkan bantuan ini.¹⁹¹

Menurut pernyataan Arya Dimantara ia menyatakan bahwa bantuan sosial PKH dapat diajukan hanya pada saat ada wacana untuk penambahan KPM baru, disinilah warga bisa mengajukan diri untuk pengajuan mendapatkan bantuan tersebut tetapi warga yang mengajukan diri pun belum pasti diterima, karena data warga yang mengajukan bantuan sosial PKH ini yang berhak mendapatkan di seleksi langsung dari pusat.¹⁹²

Menurut pernyataan ibu Baiti Ekawati bantuan sosial PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana ini memang belum merata seluruhnya dimana masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh dengan adanya dana bantuan sosial PKH ini sehingga seharusnya dari pihak pusat bisa menambah kuota bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkannya, karena dilihat dari jumlah penduduk Kelurahan Kali Balau Kencana yang rata-rata masyarakatnya masih banyak yang belum sejahtera¹⁹³

¹⁹⁰ Mayla, Cucu Irawati, Aninda Novianti, Amelia, M Sisilia Susanti, Wawancara Warga Jalan Pangeran Antasari Gang Family, pada tanggal 26 Maret 2019.

¹⁹¹ Yunita Dewi, Wawancara Warga Jalan Pangeran Antasari Gang Family, pada tanggal 26 Maret 2019.

¹⁹² Wawancara, A. Arya Dimantara.

¹⁹³ Wawancara, Baiti Ekawati.

Dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini setiap sebulan sekali ada pelatihan yakni bentuk kegiatannya adalah FDS (Family Development Season) dimana kegiatan ini untuk membantu meningkatkan kemampuan ibu-ibu KPM dalam hal pengasuhan anak dan peningkatan ekonomi.¹⁹⁴

Menurut pihak pendamping Baiti Ekawati saat melakukan kegiatan FDS ke KPM, masih banyak KPM yang bandel masih sulit untuk diatur. Padahal kegiatan FDS hanya dilakukan sebulan sekali, tetapi KPM masih banyak yang absen untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan FDS ini apabila tidak diikuti oleh KPM maka saat pencairan dana bantuan sosial PKH dana bantuan akan ditahan.¹⁹⁵

D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kelurahan Kali Balau Kencana

Penyaluran bantuan sosial PKH ke KPM di Kelurahan Kali Balau Kencana terdapat beberapa masalah yang menghambat bantuan sosial PKH tersalurkan ke KPM, pihak pendamping mendapati beberapa faktor-faktor penghambat tersebut yaitu masalah dari pusat dan dari KPM bantuan sosial PKH itu sendiri.

Faktor penghambat utama dari pusat antara lain seringnya mendapati masalah di saldo atm penerima bantuan. Menurut pernyataan Ibu Agustina yakni dirinya pernah mengalami permasalahan di saldo kosong, setelah itu ibu Agustina langsung mengurusnya dengan jangka waktu yang cukup lama

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵*Ibid.*

yakni 4 bulan.¹⁹⁶ Hal serupa pun di alami Ibu Samini bahwa ia pernah mendapati saldo kosong sehingga tidak cair nya bantuan sosial PKH.¹⁹⁷ Sebagaimana pernyataan wawancara dari Ahmad Arya Dimantara menyatakan, saat pihak pendamping mendampingi KPM bantuan sosial PKH yang hendak mengambil uang bantuan di atm, pertama saldo yang didapat tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya didapat, kedua KPM pun mengecek saldo hanya mendapati saldo nol saat akan pengambilan bantuan sosial PKH tersebut, ketiga masih ada KPM yang belum mendapatkan kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) dan buku tabungan dari bank sehingga KPM tidak bisa mengambil uang bantuan tersebut di bank.¹⁹⁸

Menurut Arief Hidayat selaku pihak operator PKH Bandar Lampung Arief Hidayat bahwa masih banyak masyarakat yang miskin tetapi tidak mendapat bantuan, lalu bantuan yang tidak sesuai dengan komponen, masih ada saldo nol, kartu dan buku tabungan masih ada yang belum dapat sehingga bantuan sosial PKH belum bisa disalurkan.¹⁹⁹

Sedangkan faktor penghambat dari masyarakat penerima bantuan PKH itu sendiri menurut Ahmad Arya Dimantara adalah saat hendak mengambil uang di atm dan didampingi pihak pendamping, terkadang masih sering terjadi masyarakat yang lupa membawa kartu atm, lalu KPM dengan masalah kartu atm hilang, dan ada KPM yang belum mengerti di katakan gaptek masih sulit

¹⁹⁶ Agustina, Wawancara Penerima Bantuan Sosial PKH, pada tanggal 26 Juni 2019.

¹⁹⁷ Samini, Wawancara Penerima Bantuan Sosial PKH, pada tanggal 25 Juni 2019.

¹⁹⁸ Wawancara, A. Arya Dimantara.

¹⁹⁹ Wawancara, Arief Hidayat.

untuk mengambil uang bantuan tersebut di atm itu sendiri sehingga harus didampingi.²⁰⁰

Dalam pelaksanaan PKH penulis mengklasifikasikan dari pernyataan wawancara masyarakat yang mendapat bantuan sosial PKH bahwasanya bantuan yang disalurkan di Kelurahan Kali Balau Kencana belum terlaksana dengan maksimal dimana didalamnya masih terdapat berbagai macam masalah, sebagaimana masalah yang terjadi diantaranya yaitu

1. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh dengan adanya bantuan sosial PKH sehingga dikatakan belum merata.
2. Saat penyaluran bantuan masih sering mengalami keterlambatan di saldo nol masalah ini terjadi karena dari pihak bank salah input nomor rekening, data warga diluar BDT (warga miskin).
3. Keterlambatan dalam mendistribusikan kartu KKS dan buku tabungan karena masih proses verifikasi data.

Masalah yang disebutkan diatas merupakan masalah yang dikeluhkan oleh KPM dan pendamping sosial PKH dan masalah tersebut masih sering terjadi sehingga bantuan PKH yang disalurkan ke KPM mengalami keterlambatan dalam pencairan dana PKH yang seharusnya dicairkan tepat pada waktunya.

²⁰⁰Wawancara, A. Arya Dimantara.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Negara terhadap Program Dinas Sosial dalam Merealisasikan Program Keluarga Harapan untuk Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung

Pada praktiknya, peran negara terhadap program dinas sosial dalam merealisasikan PKH sangat menentukan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana, kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kali balau kencana berdasarkan hasil penelitian sangat membutuhkan peran negara sekaligus aparat pemerintah dalam menjalankan program kerja Program Keluarga Harapan.

Namun bantuan PKH yang disalurkan di Kelurahan Kali Balau Kencana belum merata dan belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak warga yang mengeluhkan tentang bantuan tersebut, dimana yang seharusnya warga tersebut yang berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan tersebut dan sebaliknya warga yang seharusnya dikatakan mampu namun mendapatkan bantuan tersebut, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 4 bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.

Dalam pelaksanaan PKH pemerintah sudah merealisasikan bantuan sosial PKH tersebut di kota Bandar Lampung dan sudah merata di 13 kecamatan salah satunya di Kelurahan Kali Balau Kencana namun belum merata dalam pembagian bantuan PKH tersebut di kelurahan kali balau kencana. Seharusnya pemerintah dapat survey langsung ke lokasi tersebut agar dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang memang benar mereka perlu untuk di bantu agar mendapatkan kehidupan yang layak.

Masyarakat yang mendapat bantuan sosial PKH tersebut sangat terbantu perekonomiannya. Data kelurahan kali balau kencana menunjukkan bahwa tingkat keluarga prasejahtera menempati urutan kedua, yakni mayoritas penduduknya berpekerjaan sebagai buruh.

Tujuan diadakannya PKH yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, memutus tali rantai kemiskinan karna penerima bantuan sosial PKH ini mendapat bantuan mencakup semua komponen yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. PKH ini hanya sebagai penunjang dan penghubung dari semua program dari kementria sosial, agar tuntas masyarakat miskin yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi.

Namun dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH ini jumlah penerima manfaat di kelurahan kbk ini masih sangat sedikit sehingga dikatakan belum merata. Dalam penyaluran ini juga ada ketidakadilan terhdap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, ada beberapa masyarakat

yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkan.

Selain itu, banyak masyarakat yang mengeluhkan saat pengambilan dana bantuan sosial PKH yaitu, sering terjadi masalah seperti:

1. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh dengan adanya bantuan sosial PKH sehingga dikatakan belum merata.
2. Saat penyaluran bantuan masih sering mengalami keterlambatan di saldo nol masalah ini terjadi karena dari pihak bank salah input nomor rekening, data warga diluar BDT (warga miskin).
3. Keterlambatan dalam mendistribusikan kartu KKS dan buku tabungan karena masih proses verifikasi data.

Masalah yang terjadi tersebut menghambat bantuan sosial PKH tersalurkan kepada masyarakat tepat pada waktunya.

Pihak pendamping pun mengeluhkan saat melaksanakan kegiatan FDS yang dilaksanakan sebulan sekali masih banyak masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan masih banyak yang absen saat pengecekan kesehatan.

Setelah dilakukan wawancara kepada pihak dinas sosial dan PKH Kota Bandar Lampung bantuan tersebut menjamin kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan program-program bantuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian mereka namun ada beberapa kekurangan dari pelaksanaan bantuan sosial PKH tersebut sehingga sedikit menghambat bantuan tersebut tersalurkan kepada masyarakat.

Dalam mengatasi masalah tersebut pendamping PKH langsung melaporkan kejadian tersebut ke dinas sosial sehingga masalah yang terjadi bisa cepat diselesaikan sehingga masyarakat dapat mengambil uang bantuan yang sempat terhambat tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Negara dalam Program Keluarga Harapan untuk Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung

Dalam Islam negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut al-Maawardi, pendirian negara ini didasarkan pada *ijma'* ulama, adalah *fardhu kifayah*. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarannya itu hukumnya juga wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).

Islam adalah salah satu agama yang memperhatikan kesejahteraan untuk umatnya, dalam mewujudkan kesejahteraan Islam telah menunjuk manusia sebagai pemimpin yaitu wakil Allah swt di muka bumi, dimana seorang pemimpin tersebut harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Islam negara yang sejahtera dimana negara yang berada dibawah ridha Allah swt, kesejahteraan itu pun ditujukan kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat dimuka bumi ini yang meliputi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Praktik Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ini telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat praktik zakat telah di lakukan oleh Rasulullah SAW yakni untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti, yang selalu digambarkan sebagai :

- a. Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi
- b. Kecukupan sandang yang bagus-bagus
- c. Tempat tinggal yang indah dan nyaman
- d. Lingkungan hidup yang sehat dan segar
- e. Hubungan sosial yang tentram dan
- f. Dikelilingi pelayan-pelayanan yang trampil dan mengairahkan
- g. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah, Tuhan Maha Pemurah

Praktik zakat telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW bahkan merupakan kewajiban bagi umat Islam, dalam mengemban dakwahnya Rasulullah mengatur kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup

dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dimana sumber pendapatan negara antara lain zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan jizyah. Nabi Muhammad telah menerapkan suatu prinsip kesejahteraan untuk dua macam kepentingan kesejahteraan materil bagi semua warga Madinah maupun kesejahteraan yang bersifat spiritual bagi mereka. Pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq peradaban Islam di zamannya dalam pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat, untuk kemaslahatan rakyat ia mengelola zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan jizyah. Pada masa Umar Ibn Al-Khatab pun diberlakukan pemungutan zakat dan jizyah. Pada masa Utsman Bin Affan diberlakukan pemungutan zakat melalui baitul mal yang dalam pengelolaannya meliputi pembangunan masjid, jembatan, jalan-jalan, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Pada masa Ali Bin Abi Thalib masih diberlakukan pengelolaan baitul mal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah pada saat bulan suci Ramadhan. Zakat juga dapat berupa zakat harta atau zakat mal.

Dalam fiqh siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek

pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum. Dengan diadakannya kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sebagaimana dalam surat At-Taubah Ayat 130 :

وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

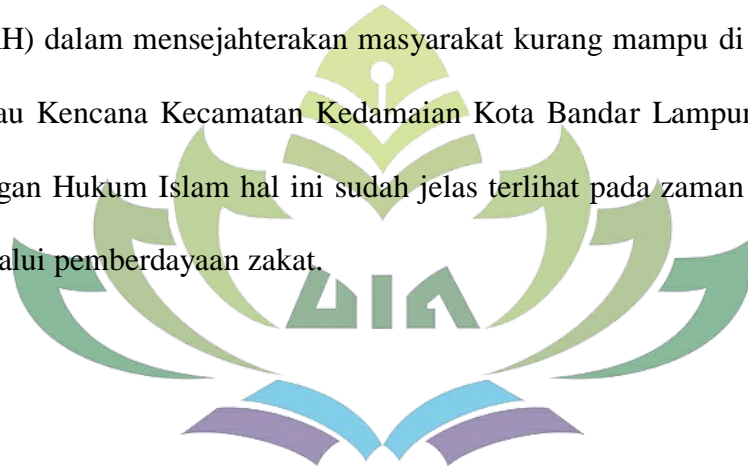
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Begitu pula pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan dimana bantuan sosial ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu, sama halnya dengan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai satu nisab dalam satu tahun. Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bisa memenuhi kebutuhan finansialnya seperti (sandang pangan), kebutuhan

psikologinya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi). Dengan zakat ini pula masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati kehidupan ini dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah swt, tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan pada saat yang sama diperlakukan sebagai entitas masyarakatnya yang terhormat bukan lagi terpinggirkan karena orang-orang mampu di masyarakat tersebut membantunya dengan zakat yang menjadi hak kaum masyarakat kurang mampu. Oleh sebab itu praktik bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Hukum Islam hal ini sudah jelas terlihat pada zaman Rasulullah saw melalui pemberdayaan zakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penelitian tersebut yang dapat di tarik kesimpulan.

1. Peran negara dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung bahwa bantuan tersebut sudah direalisasikan hanya saja belum optimal di Kelurahan Kali Balau Kencana, bantuan tersebut meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya bantuan sosial PKH ini masyarakat menjadi lebih terbantu perekonomiannya sehingga bisa menjalani kehidupan yang lebih layak.

Tetapi bantuan yang direalisasikan tersebut masih terdapat masalah yaitu bantuan yang belum merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap warga lain dan permasalahan saldo kosong di rekening para penerima bantuan sosial masalah ini terjadi karena dari pihak bank salah input nomor rekening, data warga diluar BDT (warga miskin) sehingga memperlambat bantuan tersebut sampai ke mereka.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung sudah sesuai dalam Hukum Islam. Yakni

program bantuan sosial PKH tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Yakni tujuannya sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah dalam merealisasikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ke masyarakat sebaiknya tidak terdapat unsur kekeluargaan yakni lebih mengutamakan masyarakat yang benar-benar tergolong tidak mampu dengan menggunakan data validasi dari kelurahan dan melihat langsung perkembangan masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana. Dalam penyaluran bantuan tersebut lebih diperbaiki sistemnya sehingga bantuan tersebut tersalur ke masyarakat tepat pada waktunya.
2. Kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan PKH maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang di sudah diatur oleh pemerintah sehingga para pendamping lebih mudah dalam mensosialisasikan bantuan tersebut ke masyarakat.
3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang positif dan kontributif dalam rangka lebih memahami hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Abuddin Nata, (ed.), *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Al Jazairy, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Saud Arabia: H. I Press, 1996.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang Undang*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni Surabaya, 2005.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid X, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed Empat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018.
- Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama, 2016.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

- H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial edisi kedua*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn ‘Abd al Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H.
- Khalifah Abdul Hakim, *Hidup yang Islam Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah dan Ubudiah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Oni Sahroni, et. Al. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo, 2018.

Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara.

Tim Grasindo, Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya: untuk Pelajar dan Umum*, Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018.

Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Press, 2008.

-----, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

-----, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 14, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Jurnal

Zaki 'Ulya, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", dalam jurnal *Al-'adalah*, Vol. VII, No. 3 Juni 2015.

Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila", dalam jurnal *Al-'adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Wawancara

Wawancara, Ahmad Arya Dimantara, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung, 23 Februari 2019.

Wawancara, Arief Hidayat, Koordinator Operator Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung, 25 Februari 2019.

Wawancara, Baiti Ekawati, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung,

Wawancara, Elvira Yusna Murti, Kasi Fakir Miskin dan Banjamsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,

Wawancara, Herpransyah Putra, Sekretaris Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Wawancara, Indrayati, Supriyati, Yuliana Wati, Lia Susanti, Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Kali Balau Kencana, 25 Juni 2019.

Wawancara, Asina, Agustinah, Samini, Yani Suryani, Marlina, Astuti, Rina Puji Astuti, Lilis, Janah, Asawati, Jamiah, Nikmah, Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Kali Balau Kencana, 25 Juni 2019.

Wawancara, Indrayati, Supriyati, Yuliana Wati, Lia Susanti, Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Kali Balau Kencana, 25 Juni 2019.

Sumber on-line.

Arifin.Wijaya. “Kalibalau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung” (On-line), tersediadi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalibalau_Kencana,_Kedamaian,_Bandar_Lampung (21 Agustus 2019)

Arifin.Wijaya. “Kedamaian,Kedamaian, Bandar Lampung” (On-line), tersedia di :
<https://buc.kim/d/6fV8r2X2BKlr?pub=link> (21 Agustus 2019)

Ammar.alamri. “Kota Bandar Lampung” (On-Line), tersedia di :
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (21 Agustus 2019)

Unknown. “Siyasah Politik Islam” (On-Line), tersedia di :
<http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/siyasah-politik-islam.html?m=1> (26 Agustus 2019).